

**KONFLIK SEBAGAI INSTRUMEN AFIRMASI
IDENTITAS DALAM MASYARAKAT PLURALIS:
TRANSFORMASI DAN REKAYASA SOSIAL PACSA KONFLIK
Studi Kasus: Konflik Sambas, Kalimantan Barat
(tahun 1999)**

PROPOSAL TESIS

Oleh:

Damianus J. Hali

(2001851006)

**PROGRAM PASCA-SARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
2003**

**KONFLIK SEBAGAI INSTRUMEN AFIRMASI
IDENTITAS DALAM MASYARAKAT PLURALIS:
Transformasi dan Rekayasa Sosial Pasca Konflik
(Konflik Sambas, Kalimantan Barat 1999)**

Usulan Seminar II Tesis:

Nama: Damianus J. Hali

NPM: 2001851006

Persetujuan untuk diseminarkan

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Bob S. Hadiwinata

Dr. Pius Suratman Kartasasmita

SEMINAR II TESIS:

**KONFLIK SEBAGAI INSTRUMEN AFIRMASI
IDENTITAS DALAM MASYARAKAT PLURALIS:
TRANSFORMASI DAN REKAYASA SOSIAL
PACSA KONFLIK**

**Studi Kasus: Konflik Sambas, Kalimantan Barat
(tahun 1999)**

Bandung, 7 Desember 2004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Identifikasi Masalah	7
a. Pembatasan Masalah	11
b. Perumusan Masalah	12
Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
Kerangka Pemikiran	17
Memahami Konflik	17
Konflik Pasca Perang Dingin	23
Konflik Tidak Sama Dengan Kekerasan	28
Konflik dan Gerakan Sosial Massa	30
Konflik Sebagai Instrumen Menciptakan Perubahan Sosial	32
Afirmasi, Transformasi, dan Rekayasa Sosial	36
Atribut Identitas yang Berbeda	39
Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	45
a. Metode Penelitian	45
b. Teknik Pengumpulan Data	46
Sistematika Penulisan	47
BAB II MENGENAL DAERAH DAN MASYARAKAT SAMBAS DI KALIMANTAN BARAT	50

2.1. Geografi	50
2.1.1. Letak Wilayah	50
2.1.2. Luas Wilayah	51
2.1.3. Jenis Tanah dan Penggunaannya	52
2.1.4. Keadaan Tanah	53
2.2. Iklim	54
2.3. Penduduk dan Angkatan Kerja	55
2.3.1. Penduduk	55
2.3.2. Angkatan Kerja	56
2.4. Pemerintahan	59
2.4.1. Sejarah dan Foklor Kesultanan Sambas	59
2.4.2. Sejarah Singkat Pemerintahan Kabupaten Sambas	61
2.5. Sosial	63
2.5.1. Pendidikan	63
2.5.2. Kesehatan	64
2.5.3. Kriminalitas	65
2.5.4. Agama	67
2.6. Pertanian	68
2.7. Industri, Perdagangan, dan Transportasi	70
2.7.1. Industri	70
2.7.2. Perdagangan	71
2.7.3. Transportasi	72
2.8. Keuangan	73
2.9. Pendapatan Regional	76

BAB III KONFLIK: DARI PERSOALAN DEMOGRAFIS

SAMPAI PRILAKU KEKERASAN	78
3.1. Persoalan Demografis	84
3.2. Konstruksi Identitas Dalam Masyarakat	91
3.2.1. Identitas Ekonomi	91
3.2.2. Identitas Politik	94
3.2.3. Identitas Etnis dan Agama	97
3.3. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Ekonomi	98
3.3.1. Sebelum Konflik	98
3.3.2. Sesudah Konflik	108
3.4. Perubahan Struktur Sosial-Politik	112
3.5. Konflik dan Mobilisasi Massa	120
3.6. Prilaku Kekerasan Dalam Konflik Identitas	124
BAB IV KONFLIK DAN TRANSFORMASI SOSIAL PASCA KONFLIK	131
4.1. Kronologis Konflik	131
4.1.1. Periode Konflik Sambas	133
4.1.2. Anatomi Konflik Sambas	135
4.2. Konstruksi Pemahaman Pasca Konflik	137
4.3.1. Masyarakat Memahami Konflik yang terjadi	137
4.3.2. Masyarakat Belajar dari Konflik yang terjadi	139
4.4. Transformasi Sosial Pasca Konflik	142
4.5. Beberapa Mekanisme Internal yang Menggagalkan Kekerasan Etnik	148
Penjarakan Sosial	148
Penerapan Hukum Adat	150
Penerapan Sanksi Internal	151
Pendekatan Kekeluargaan	152

Kerja Sama Antar Tokoh Masyarakat	152
Kesigapan dan Ketegasan Para Penegak Hukum	153
Peran Media Massa	154
Perimbangan Kekuatan	155
Frakmentasi Etnik	158
BAB V KONFLIK SEBAGAI INSTRUMEN AFIRMASI	162
5.1. Afirmasi Pasca Konflik	163
5.1.1. Afirmasi Kesadaran Individual dan Kelompok	163
5.1.2. Penegasan Harga Diri di tengah Massa	170
5.1.2. Penerimaan dan Pengakuan Lewat Intersubyektivitas	177
5.2. Rekayasa Sosial	181
5.2.1. Rekayasa Sosial Pasca Konflik (Sambas)	189
5.2.2. Rekayasa Pengalaman Traumatik	193
5.2.3. Rekayasa Kebijakan	200
BAB VI KESIMPULAN DAN PENUTUP	205
6.1. Kesimpulan	205
6.2. Penutup	213
DAFTAR PUSTAKA	215

INTISARI

Pergeseran ruang lingkup konflik, dari konflik antar negara ke konflik internal negara pasca Perang Dingin memunculkan banyak kajian tentang konflik. Namun maraknya kajian konflik, terutama konflik internal negara seakan berbanding lurus dengan menjamurnya konflik di berbagai kawasan. Sehubungan dengan kedaulatan sebuah negara, konflik internal negara pada awalnya dipahami sebagai urusan dalam negeri suatu negara. Namun karena terjadi perkembangan kepentingan yang dimobilisasi ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi, setiap negara merasa berkewajiban untuk turut campur tangan dalam mencari jalan penyelesaian terhadap konflik di suatu negara. Hal ini mudah dipahami karena konflik di suatu negara berakibat pada munculnya ancaman ketidakstabilan ekonomi, politik dan keamanan di kawasan itu. Dan jika konflik berkepanjangan serta makin meluas maka akan terjadi ketidakstabilan internasional dan global. Akibat inilah yang mendorong setiap negara untuk ambil bagian dalam menyelesaikan konflik di suatu negara.

Konflik-konflik yang bernuansa sara, khususnya etnis dan agama di Indonesia seperti terjadi di Kalimantan Barat, Ambon, Kupang, Mataram, dan beberapa tempat lain yang skalanya lebih kecil tidak bisa lepas dari pengaruh pergeseran ruang lingkup konflik di atas. Secara temporal merebaknya konflik di Indonesia menyusul tumbanganya rezim otoriter orde baru tahun 1998, yang kemudian disusul dengan tuntutan “reformasi”. Tuntutan reformasi di segala bidang ternyata mempunyai implikasi lain, yakni menguatnya tuntutan berbagai kelompok masyarakat untuk menunjukkan identitas yang berbeda. Mengemukanya kepentingan identitas, terutama etnis dan agama menyertai hiruk-pikuknya bangsa Indonesia menyambut jaman reformasi. Di jaman ini

orang tidak perlu takut pada bedil tentara atau pentungan polisi, tidak perlu takut diculik dan disekap dalam ruang gelap, sebagaimana terjadi di jaman orde baru, di mana kesempatan untuk menunjukkan identitas yang berbeda harus dibayar mahal, termasuk nyawa bisa menjadi taruhan.

Dengan demikian, gesekan kepentingan identitas yang mengambil wujud kekerasan sosial massal atau konflik terbuka merupakan harga yang harus dibayar untuk sebuah reformasi atau perubahan. Hanya pertanyaannya, sampai kapan proses reformasi ini berhenti menuntut korban, terutama berkaitan dengan hilangnya jiwa dan harta benda. Banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu, politisi dan pengamat menilai serta berspekulasi bahwa kondisi ini hanya sementara; Indonesia sedang berada dalam situasi transisional, dari negara otoriter ke negara demokratis. Namun tidak sedikit pula orang menilai bahwa kondisi ini merupakan signal berakhirnya “mitos” negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai respon terhadap kondisi ini, muncul berbagai kajian guna mencari sebab-sebab terjadinya konflik dan sekaligus menginventarisir solusi-solusi yang memungkinkan dan realistis.

Sejalan dengan upaya di atas, tulisan ini mencoba membahas sudut pandang dalam memahami konflik. Tujuan akhirnya tidak lain untuk memperkaya pemahaman yang telah ada sebelumnya. Konflik, terutama konflik terbuka yang memperlihatkan agresivitas naluriah manusia dalam wujud tindakan kekerasan terhadap manusia lain memang patut dihindari dan diantisipasi. Semua pihak pasti berkepentingan ketika konflik menuntut korban jiwa dan harta benda yang tak ternilai harganya. Namun satu hal yang tidak bisa dilupakan bahwa sekuat apa pun upaya menghindari dan mengantisipasi konflik, potensi konflik atau sering disebut konflik laten tetap ada. Kenyataan ini mengingatkan manusia bahwa konflik sesungguhnya suatu yang lamiah, bahkan dalam banyak hal dibutuhkan untuk menciptakan perubahan. Potensi perubahan inilah yang ingin diangkat dalam tulisan ini, dengan mencermati secara saksama kondisi sosial masyarakat pasca konflik. Konflik sebagai instrumen terciptanya proses afirmasi identitas yang didahului proses

transformasi sosial pasca konflik. Artinya, melalui proses transformasi, konflik bisa menjadi instrumen terciptanya afirmasi atau penegasan identitas di dalam masyarakat pluralis. Dengan demikian tema pokok tulisan ini adalah: “Konflik Sebagai Instrumen Afirmasi Identitas dalam Masyarakat Pluralis”: Transformasi dan Rekayasa sosial pasca konflik. Studi kasus: Konflik Sambas (Melayu vs Madura) tahun 1999.

Salah satu persoalan pokok dan amat penting dihadapi pihak-pihak yang bertikai pasca konflik adalah membangun kembali tatanan sosial dan relasi yang telah rusak akibat konflik. Persoalan ini akan dibahas secara mendalam dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan potensi positif yang muncul di tengah masyarakat pasca konflik. Melalui upaya rekayasa sosial, penulis akan membahas, bagaimana proses peleburan cakrawala atau perpaduan kepentingan-kepentingan identitas yang berbeda di antara pihak-pihak yang bertikai pasca konflik. Rekayasa sosial sebagai sebuah konsep diimplementasikan melalui rekayasa pengalaman traumatik dan rekayasa kebijakan (pemerintah). Semua ini dilakukan dalam upaya mencapai tahap afirmasi dan bukan sekadar transformasi sosial. Afirmasi atau penegasan dan penerimaan kembali identitas yang hilang pasca konflik merupakan babak baru yang amat penting dalam membangun masa depan yang lebih baik dan secara bersama-sama.

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Munculnya studi hubungan internasional sebagai bidang studi tersendiri dan bukan lagi bagian dari studi sejarah bermula dari keinginan untuk membina hubungan baik antar negara guna terciptanya tatanan dunia yang lebih damai. Keinginan ini mengemuka terutama setelah berakhirnya Perang Dunia I. Perang Dunia I dipahami sebagai awal sejarah buruk hubungan antar bangsa di dunia sehingga dibutuhkan penataan ulang melalui kajian-kajian yang lebih kritis, rasional dan realistis, dan bukan lagi hanya mengandalkan teorisasi normatif dan utopian.

Asumsi dasar yang melatarbelakangi keinginan ini adalah setiap negara tidak ingin hidup dalam suasana ketakutan, kacau dan konflik yang berkepanjangan. Dari sana kemudian muncul kajian-kajian, terutama untuk memahami sebab-sebab terjadinya konflik. Sejak tahun 1930-an studi tentang konflik mulai digeluti para pakar hubungan internasional. Tokoh-tokoh seperti Frederick Schuman menulis buku, *International Politics* pada tahun 1933. Dalam buku ini ia menolak argumen teoritis normatif kemudian memelopori penggunaan konsep kekuasaan untuk menjelaskan fenomena hubungan internasional secara realistis. Lewis F. Richardson, seorang ahli matematika Inggris menerapkan statistik dan model-model matematika untuk mempelajari hubungan antara perlombaan senjata dan terjadinya perang. Quincy Wright menulis karya monumental yang memperbandingkan berbagai perang yang terjadi sejak masa awal sejarah sampai masa itu dengan tujuan membuat teori tentang perang dan konflik. Harold Lasswell memelopori studi tentang hubungan antara politik dunia dan psikologi dengan

penekanan pada masalah persepsi, simbol dan citra. Sementara itu tokoh-tokoh lain pun berusaha mempelajari hubungan antara masalah perbedaan etnik, ras, faktor geografis, dsb dengan hubungan internasional.

Maraknya kajian yang berkaitan dengan penataan kembali hubungan antar bangsa pada masa antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II ternyata tidak bisa menjadi barometer untuk menilai bahwa tidak akan terjadi perang berikutnya. Terbukti Perang Dunia II tetap terjadi dan kembali memporak-porandakan tatanan hubungan antar bangsa. Setelah Perang Dunia II dan memasuki babak baru yang disebut Perang Dingin, kajian tentang konflik kembali menjadi topik menarik yang dipelajari dalam hubungan internasional, bahkan bisa dikatakan jauh lebih intensif dibandingkan masa-masa sebelumnya. Hasilnya memang nampak karena perang, khususnya perang pada level negara berhasil diredam sampai tingkat yang paling minimum. Lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang awalnya disebut Liga Bangsa Bangsa (LBB) berhasil dibentuk dan mulai menjalankan fungsinya sebagai pencegah dan penjaga perdamaian dunia. Namun ada fenomena menarik terjadi pasca Perang Dingin, yaitu bergesernya ruang lingkup konflik, dari konflik antar negara ke konflik internal negara. Pergeseran ruang lingkup ini ternyata diikuti pula dengan pergeseran pola dan motif yang membedakan konflik antara negara dengan konflik internal negara.

Terlepas dari beragam pola dan motif, khususnya konflik internal negara dibandingkan konflik antar negara, terdapat satu asumsi dasar terjadinya konflik, yaitu memperkarakan perbedaan kepentingan identitas. Perbedaan identitas diekspose habis-habisan sampai akhirnya terjadi pertikaian atau konflik terbuka. Padahal perbedaan jika ditelaah lebih jauh sesungguhnya sesuatu yang sangat *natural*, dan ketika dikaitkan dengan kepentingan tertentu pun masih *natural*. Setiap manusia, baik individu maupun kelompok pasti selalu berjuang untuk memenuhi kepentingannya masing-masing. Hal ini sangat wajar. Namun ketika perbedaan dikaitkan dengan

kepentingan identitas yang lebih luas dari sebuah komunitas maka muncul akumulasi kekuatan yang saling berhadapan. Akumulasi kekuatan yang terus-menerus melalui bantuan media formal maupun informal mengakibatkan suasana menjadi tegang (panas), dan jika tidak segera ditangani maka konflik terbuka pun tidak bisa dihindari. Perjuangan atas kepentingan sendiri atau kelompok melalui akumulasi kekuatan secara alamiah memunculkan benturan atau gesekan dengan kepentingan kelompok lain. Dengan demikian proses yang berawal dari perbedaan sampai pada akhirnya pecah konflik merupakan proses alamiah yang bisa terjadi kapan saja dan bisa dialami siapa pun.

Dalam dunia dewasa ini, pertentangan kepentingan identitas yang berujung pada kekerasan kolektif akan semakin sulit dihindari. Setiap kelompok, baik di level negara maupun internal negara seakan terus berlomba untuk mengedepankan kepentingannya masing-masing, Akibatnya, konflik kekerasan meluas ke hampir seluruh penjuru dunia. Berkaitan dengan terus meningkatnya jumlah konflik, khususnya di internal negara, Singer dan Small (1972) pernah melakukan studi, dan hasilnya menunjukkan bahwa pada periode 1816 – 1965 tercatat lebih dari 1.000 konflik antar negara yang diwarnai kekerasan. Dan yang mengejutkan dari hasil studi ini adalah jumlah konflik internal negara. Setiap tahun (bukan setiap periode seperti konflik antar negara), konflik internal negara tidak kurang dari 1.000 konflik (Singer dan Small, 1972; hlm. 381-2). Data ini jelas menunjukkan bahwa jumlah konflik internal negara jauh lebih besar dibandingkan dengan konflik antar negara. Dan jika melihat tipologi konflik internal negara, umumnya mempersoalkan identitas atau separatisme, di mana ada kelompok yang merasa dipaksa untuk menerima nilai atau norma kelompok lain. Selain itu ada konflik faksional yang mempersoalkan kepentingan yang sifatnya sangat primordial, seperti etnis, agama, ras, bahasa, wilayah, dan adat-istiadat.

Melihat fenomena ini, daya kritis manusia terus dipacu untuk mencari dan menemukan cara terbaik mengatasi konflik, sehingga muncul berbagai teori dan pendekatan terhadap konflik. Seiring dengan meningkatnya kajian konflik, terutama konflik internal negara, peningkatan jumlah konflik nampaknya tidak mau kalah. Maraknya konflik seakan ingin menantang kreatifitas para pakar konflik untuk segera menemukan resep ampuh dalam mengatasi konflik sehingga perlahan-lahan dapat mengurangi jumlah konflik di berbagai kawasan. Namun sampai hari ini resep itu belum muncul, atau mungkin sudah ada, tetapi tidak efektif dalam implementasinya. Bahkan sebaliknya para pengamat internasional menyebut dunia yang kita diami saat ini sebagai suatu “*turbulent world*” (dunia yang penuh guncangan), di mana gangguan keamanan dan kekerasan terus mewarnai kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Belum sempat menemukan strategi teori yang tepat untuk mengatasi konflik di berbagai kawasan, masyarakat kemudian harus menghadapi dinamika yang ditimbulkan globalisasi. Melalui nilai liberalisme dan demokrasi, globalisasi bukannya membantu menciptakan suasana tenang, malahan mendorong terjadinya gejolak akibat munculnya berbagai kepentingan identitas. Globalisasi terbukti berhasil membuka “kran” kebebasan pada manusia modern, yang berakibat pada mengemukanya tuntutan untuk menunjukkan identitas yang berbeda. Jika hal ini tidak dikelola secara kreatif maka konflik pun tidak dapat dihindari. Dalam hal tertentu manusia modern memang punya kecenderungan untuk menolak globalisasi. Globalisasi dipandang sebagai ancaman berat terhadap identitas – oleh karena nilai yang ditawarkannya berbeda dengan nilai-nilai yang telah dianut dan diyakini. Namun sayang alasan ini tidak cukup kuat untuk menolak globalisasi. Globalisasi adalah fakta, entah disukai atau tidak.

Pada tataran global, fenomena berakhirnya Perang Dingin menciptakan instabilitas di berbagai kawasan seperti Afrika, Balkan, dan bekas Uni Soviet, termasuk Asia, sekalipun dalam skala yang lebih kecil. Sejak tahun 1990 berbagai konflik ideologis yang ditandai dengan rivalitas

Blok Timur (Marxisme-Leninisme) dan Blok Barat (Kapitalisme-Liberalisme) memang mulai meredah, namun berbagai konflik baru bermunculan sebagai akibat dari penarikan bantuan ekonomis yang bermotif ideologis dari Barat dan Timur. Situasi ini menciptakan ketidakpastian sistemik di berbagai kawasan. Perubahan menuju struktur politik baru ternyata diikuti dengan bermunculannya berbagai kepentingan politis-ekonomis yang bercampur aduk dengan sentimen etnis-religius. Dalam situasi seperti ini, negara nampaknya kewalahan dalam merespon tuntutan kelompok-kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan situasi transisional ini untuk kepentingan mereka.

Menurut Hugh Miall (1999), konflik di tingkat regional juga muncul akibat tekanan yang makin keras terhadap peran negara sebagai sebuah kekuatan yang berdaulat atas wilayah dan warganya. Tekanan terhadap negara datang dari kekuatan-kekuatan, baik dari “dalam” maupun dari “luar” yang mengakibatkan bergesernya posisi negara ke posisi defensif. Dari dalam, muncul kekuatan faksional (berdasarkan perikatan etnis, agama, suku, ras, bahasa, dll) yang terus-menerus berupaya merongrong posisi negara. Dari luar, fenomena globalisasi sistem internasional membuat garis batas negara menjadi semakin tidak berarti dan dipandang tidak relevan dari waktu ke waktu. Akumulasi dua pengaruh ini memunculkan kerentanan perikatan negara-bangsa. Anthony Smith (1986:152) mengatakan: “tugas utama setiap negara dewasa ini adalah menciptakan stabilitas di tengah-tengah tarikan arus etnisitas yang makin keras. Namun sangat disayangkan bahwa tidak banyak negara yang sanggup melaksanakan tugas ini dengan baik”. Kata-kata Anthony Smith ini sangat tepat untuk menilai situasi terakhir terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang membangun pemerintahannya hampir selalu tidak wajar, dalam pengertian, naik-turunnya seorang pemimpin selalu diwarnai ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Pemerintahan akhirnya dijalankan atas dasar legitimasi yang rendah. Setiap kebijakan yang dihasilkan tidak mendapatkan dukungan penuh masyarakat.

Tambahan pula, pemerintah tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk merespon kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Akibatnya, “kreativitas” untuk menunjukkan kepentingan identitas yang berbeda dalam berbagai bentuk bermunculan tanpa kendali pemerintah. Kreativitas ini kelihatannya wajar saja, tetapi akibatnya bisa dipastikan akan berkonflik, baik dengan kelompok lain (horisontal) maupun pemerintah yang berkuasa (vertikal). Kondisi itu mendorong penulis untuk membahas tema ini, dengan perhatian utama pada proses afirmasi dan transformasi sosial pasca konflik Sambas, Kalimantan Barat tahun 1999.

Di tingkat domestik Indonesia, nampak bahwa pemerintah dan LSM telah berupaya serius untuk mengatasi konflik yang terjadi, baik di Sambas, Ambon, Poso, Mataram maupun Kupang, dan diberbagai tempat lain yang skalanya lebih kecil. Namun hasilnya hanya sampai pada upaya menghentikan konflik. Upaya normalisasi kehidupan kelompok yang telah bertikai nampaknya belum berhasil. Atau kalau sudah berhasil pun sifatnya hanya sementara atau diam sesaat. Seandainya suatu saat upaya normalisasi kehidupan kelompok-kelompok yang telah bertikai berhasil, itu tidak berarti bisa menjadi jaminan untuk tidak terjadi pertikaian atau konflik susulan. Kemungkinan terjadinya konflik susulan masih sangat besar; jika bukan generasi sekarang mungkin generasi berikutnya dan seterusnya demikian. Dalam situasi stabil dan damai saja potensi konflik tetap ada, dan konflik terbuka akan muncul sangat tergantung pada besarnya pengaruh faktor pemicu.

Dengan demikian penulis berkeyakinan bahwa konflik tidak akan pernah bisa dihindari, bahkan sebaliknya, konflik merupakan bagian yang inheren dalam hidup manusia. Manusia mungkin bisa menyembunyikan perbedaan masing-masing, tetapi ketika datang pengaruh yang lebih besar dari kekuatan mereka untuk menyembunyikan perbedaan itu maka pada saat itu juga terjadi konflik terbuka. Kompleksitas kepentingan akan terus meningkat seiring dengan intensifnya interaksi antar manusia dan besarnya pengaruh, mulai dari globalisasi sampai

dengan pola pengelolaan pemerintahan lokal yang tidak kompeten dan tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Semua itu bisa menjadi penyebab terjadinya konflik, dan penyebab-penyebab itu akan selalu eksis dalam perjalanan hidup manusia, bahkan manusia terkesan sengaja menciptakan penyebab untuk memicu konflik dengan pihak lain. Maka dalam konteks inilah penulis menempatkan tema: *Konflik Sebagai Instrumen Afirmasi Identitas Dalam Masyarakat Pluralis: Rekayasa dan Transformasi Sosial Pasca Konflik*. Studi Kasus: Konflik Sambas, Kalimantan Barat tahun 1999.

IDENTIFIKASI MASALAH

Era pasca Perang Dingin, konflik yang dilatarbelakangi perbedaan kepentingan identitas, baik di bidang ekonomi, politik, budaya, agama, etnis maupun suku dapat menjadi wacana yang akan terus dibicarakan. Globalisasi pasca Perang Dingin mempunyai kecenderungan untuk menyeragamkan semua aspek yang berbeda namun pada kesempatan yang sama muncul tuntutan untuk menunjukkan identitas yang berbeda dari setiap kelompok masyarakat. Tuntutan untuk menunjukkan kepentingan identitas pada gilirannya memunculkan konflik terbuka. Dan ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh siapa pun dan oleh bangsa manapun. Sehingga persoalan pokoknya bukan bagaimana mengatasi apalagi menghindari globalisasi, tetapi bagaimana manusia di jaman ini menyikapi globalisasi. Dalam konteks ini penulis ingin membahas respon pemerintah, khususnya Indonesia dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang pada intinya ingin menyesuaikan diri dengan perkembangan global. Secara tidak langsung kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama pemerintahan orde baru yang bersifat represif dan menyeragamkan semua aspek, pada jaman reformasi justru memunculkan gejolak dan protes di berbagai tempat. Gejolak yang terjadi pasca regim orde baru ternyata berkaitan erat dengan

upaya atau tuntutan untuk menunjukkan identitas primordial seperti etnis, suku, ras, agama, adat-istiadat, yang pada jaman orde baru tidak mendapat kesempatan.

Globalisasi memang tidak ada kaitan langsung dengan konflik yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Barat atau Sambas khususnya. Namun kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya alam dan ekonomi yang hanya menitikberatkan nilai komersial demi peningkatan produktivitas nasional kerap kali mengabaikan tata nilai dan adat masyarakat setempat. Upaya meningkatkan produktivitas nasional dapat dipahami sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mensejajarkan dirinya dengan negara lain dalam era globalisasi, Akibatnya, di satu pihak pemerintah ingin meningkatkan pendapatan nasional melalui ekstraksi maksimal sumber daya alam demi meningkatkan posisi tawarnya di tataran global, namun di lain pihak ekstraksi yang hanya mengutamakan produktivitas dan nilai jual menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat. Dalam era reformasi masyarakat Kalimantan Barat seakan mendapat kesempatan untuk melihat kembali berbagai kerugian yang mereka alami, baik secara ekonomi, sosial dan budaya akibat praktik pengelolaan sumber daya alam di masa lampau. Di tengah munculnya semangat untuk menata kembali sistem pengelolaan sumber daya ekonomi itu, sebuah komunitas masyarakat yang dinilai arogan (baca: etnis Madura) terkesan ingin menghalangi, dalam pengertian, lahan-lahan pertanian dikuasai, muncul perilaku-prilaku yang menorehkan kesan tidak adanya penghargaan terhadap adat dan budaya masyarakat setempat. Semua ini mengingatkan masyarakat Kalimantan Barat pada situasi sebelum reformasi, sehingga tak pelak lagi mereka melawan habis-habisan. Dalam benak kelompok masyarakat seperti ini ada persepsi bahwa kelompok atau komunitas lain adalah ancaman bagi kelompoknya sehingga harus dilawan dan diperangi. Kondisi ini menempatkan masyarakat dalam situasi selalu tidak aman, yang pada gilirannya mencari rasa aman dengan cara menguatkan ikatan identitas. Penguatan ikatan identitas pada gilirannya memunculkan gesekan atau benturan dengan

identitas lain. Maka persoalan pokoknya adalah bagaimana masyarakat mendapatkan kembali rasa aman, tanpa ada kecurigaan, ketakutan dan upaya untuk meniadakan kelompok lain ? Konflik bisa saja terjadi, tetapi bagaimana menyikapi dan mengelolah konflik itu. Dalam konteks ini penulis ingin menempatkan konflik sebagai sebuah entitas yang integral dalam hidup bermasyarakat, baik pada tingkat makro-sosiologis maupun mikro-sosiologis.

Yang patut dihindari dan diantisipasi dalam konflik adalah perilaku kekerasan massal yang menuntut korban jiwa dan harta benda, bukan konflik. Karena konflik merupakan konsekuensi logis dari mengemukakan kepentingan yang berbeda dan merupakan suatu yang alamiah. Atau lebih mendasar, konflik adalah bukti bahwa manusia hidup dan selalu berjuang untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Memang harus diakui bahwa suatu peristiwa konflik bisa mengarah ke tindakan kekerasan seperti membunuh dan membantai, tetapi konflik tidak identik dengan tindakan kekerasan atau saling membunuh dan membantai. Dengan demikian persoalan pokok yang harus dicermati di sini adalah mencari dan menemukan instrumen lain dalam memperjuangkan kepentingan identitas yang berbeda. Kenyataan menunjukkan bahwa tindakan kekerasan muncul saat masyarakat tidak menemukan instrumen lain dalam menyampaikan atau memperjuangkan kepentingannya.

Meskipun, Kenneth Waltz dalam bukunya yang berjudul *Man, the State and War* (1995) mengatakan, manusia pada hakekatnya berkarakter agresif dan saling membunuh satu sama lain. Namun penulis berpandangan bahwa karakter ini tidak hidup dalam ruang hampa atau vakum, dalam pengertian, semua kepentingan hanya bisa diraih kalau berhasil mengekspresikan karakter yang satu ini (berperang dan saling membunuh). Kenyataan bahwa dalam relasi sosiologis, manusia selalu dituntut untuk menemukan instrumen lain dalam memperjuangkan kepentingannya, misalnya melalui negosiasi atau perundingan dengan cara mensharing kepentingan yang berbeda. Alternatif ini muncul justru pada saat manusia dipaksa untuk tidak

menggunakan cara-cara kekerasan atau perang dalam memperjuangkan kepentingannya. Lebih lanjut (khusus di level negara), Waltz mengatakan, perdamaian hanya bisa ditegakkan jika masing-masing negara bersiap-siap untuk berperang. Waltz memang betul, namun satu hal yang penulis pahami bahwa dalam situasi berjaga-jaga setiap negara justru berupaya meningkatkan kerja sama dengan negara lain – kalau sulit di bidang politik (pertahanan-keamanan) – bergeser ke bidang ekonomi atau kebudayaan. Hal ini terjadi pada Hong Kong dan Taiwan yang secara politis tidak diakui Cina sebagai sebuah negara, tetapi keduanya bisa menjalin kerja sama di bidang ekonomi dan kebudayaan dengan negara lain. Oleh karena itu, pokok persoalannya adalah bagaimana peran negara memperkenalkan berbagai instrumen dalam memperjuangkan kepentingan identitas yang berbeda tanpa harus berperang dan saling membunuh. Dalam konteks ini penulis ingin membahas konflik sebagai instrumen afirmasi perbedaan kepentingan identitas dalam masyarakat pluralis. Konflik dipahami secara fungsional sebagai mekanisme penyempurnaan proses integrasi di antara kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan. Konflik yang dikelola secara kreatif akan menghasilkan konsensus, yang pada intinya mengembangkan proses dialogis dalam rangka menegakkan perdamaian.

Kemudian untuk melihat bagaimana konflik dapat menyempurnakan proses integrasi nasional di antara kelompok yang berbeda kepentingan maka penulis melakukan studi kasus berkaitan dengan proses afirmasi dan transformasi sosial pasca konflik etnis di Sambas, Kalimantan Barat (antara komunitas etnis Madura vs Melayu). Studi kasus ini menjadi amat penting karena point yang ingin dikemukakan adalah bagaimana proses afirmasi dan transformasi sosial berjalan pasca konflik. Proses afirmasi atau penegasan identitas bisa berhasil tetapi juga bisa gagal. Oleh karena itu sangat dibutuhkan rekayasa sosial guna menggiring dan mengamankan dinamikan proses itu sehingga berjalan sesuai harapan. Artinya, muncul kesadaran untuk secara bersama-sama membangun perdamaian pasca konflik.

A. Pembatasan Masalah

Mengingat luas dan melebarnya pembahasan mengenai konflik maka tulisan ini bermaksud hanya mengkonsentrasikan diri pada pembahasan mengenai penyebab dasar terjadinya konflik, terutama berkaitan dengan pencitraan negatif yang mengkrystal dalam bentuk penguatan ikatan identitas (etnis). Selain itu persoalan perbedaan kepentingan identitas dalam pengertian yang luas; identitas ekonomi dan status sosial (kaya – miskin), politik dan ideologi (nasionalis – sektarian), budaya (etnis, suku, adat-istiadat, bahasa) dan agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hucu, dll). Pembahasan mengenai penyebab dasar ini diharapkan akan terungkap persoalan spesifik yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Namun pembahasan sehubungan dengan penyebab dasar hanya sebagai kerangka acuan untuk memahami dinamika konflik yang terjadi, karena pembahasan lebih lanjut hanya difokuskan pada proses transformasi sosial pasca konflik melalui upaya rekayasa sosial yang pada akhirnya tercipta afirmasi atau penerimaan identitas di antara pihak-pihak yang bertikai. Afirmasi merupakan poin penting dan tujuan akhir dari seluruh poses perdamaian pasca konflik. Sehingga yang akan dicermati secara khusus melalui penelitian lapangan adalah bangunan relasi sosial masyarakat pasca konflik dan upaya rekayasa sosial berbagai pihak dalam menormalisasi kehidupan masyarakat.

Dalam upaya resolusi konflik dikenal istilah *peace-keeping*, *peace-building* dan *peace-making*. Tulisan ini secara khusus akan membahas bagaimana aktivitas politik dan diplomasi dalam rangka rekonsiliasi melalui mediasi, negosiasi, arbitrase, dan permufakatan (*peace-building*). Atau lebih khusus lagi memperhatikan upaya merancang dan menyediakan lingkungan yang damai dan aman, yang dapat menjamin kelompok-kelompok, baik secara politik, ekonomi, maupun psikologi sosial (*peace-making*). Jadi perhatian utama hanya difokuskan pada *peace-*

building dan *peace-making*. Sedangkan untuk *peace-keeping* dianggap sudah lewat dan tidak relevan dibahas di sini karena konflik telah berakhir.

Berkaitan dengan studi kasus, yaitu konflik Sambas, Kalimantan Barat; menurut beberapa data yang penulis peroleh, sejak tahun 1952 sampai 2003 telah terjadi 18 kali konflik di Kalimantan Barat, yaitu 13 kali konflik antara etnis Dayak vs Madura, 1 kali antara etnis Dayak vs Cina, dan 4 kali antara etnis Melayu vs Madura. Dari 18 kali konflik itu, penulis hanya akan mengkonsentrasikan penelitian pada konflik Sambas tahun 1999, antara etnis Melayu (didukung etnis Dayak) vs Madura. Namun itu tidak berarti penulis sama sekali tidak menyinggung konflik lain di wilayah Kalimantan Barat. Sejauh konflik lain di luar konflik Sambas bisa membantu dan ada kaitannya dengan konflik Sambas maka penulis pasti membahasnya.

Dengan demikian kalau boleh disingkat, pembahasan ini pertama-tama melihat penyebab dasar terjadinya konflik, yaitu perbedaan kepentingan identitas, terutama identitas primordial dan pencitraan negatif yang terintegrasi dalam identitas etnis. Kemudian karena konflik terbuka telah terjadi, dan penulis bermaksud melihat konflik itu secara positif dan optimis maka fokus pembahasan akan diarahkan pada proses afirmasi dan transformasi sosial pasca konflik. Dalam hal ini, penulis akan mencermati secara khusus babak baru relasi sosial yang terbangun pasca konflik.

B. Perumusan Masalah

Setelah mengetahui fokus pembahasan di atas, berikut ini penulis akan mencoba merumuskan persoalan atau masalah penelitian. **Pertama**, persoalan yang kerap dihadapi dalam mencari jalan penyelesaian atau damai, terutama untuk konflik internal negara adalah kesulitan menentukan dan mendeteksi penyebab terjadinya konflik. Berbagai persoalan umumnya terkait satu dengan yang lain, mulai dari yang terlihat kasat mata sampai dengan yang

tidak terlihat, bahkan cenderung tidak rasional seperti persoalan tradisi nenek moyang misalnya. Untuk itu masalah yang dibahas di sini adalah bagaimana konstruksi persoalan yang melatarbelakangi terjadinya konflik ?

Kedua, pencitraan negatif, di mana lingkungan sosial mengkonstruksi citra negatif sedemikian sehingga orang yang dicitrakan negatif seakan-akan tidak berharga dan bernilai di depan sesamanya. Media massa, baik cetak maupun elektronik – formal maupun informal merupakan mesin pencitraan yang menyebarkan citra negatif sehingga lama-kelamaan mengkristal dan menempel erat pada identitas seseorang atau sekelompok orang. Citra negatif terintegrasi ke dalam identitas sehingga kalau mendengar atau menyebut identitas tertentu, orang langsung teringat pada citra negatif. Komunitas etnis Madura di Kalimantan Barat dicitrakan sebagai orang yang keras, cepat tersinggung, gampang membunuh, dsb, disebarluaskan di seluruh Kalimantan, bahkan seluruh Indonesia sehingga mendengar sebutan Madura, orang langsung mengaitkannya dengan citra negatif. Dalam hal ini, antara pencitraan dan identitas terkait sangat erat. Persoalan muncul ketika orang-orang yang dicitrakan negatif tidak menerima atau menolak citra itu karena bagi mereka citra itu mendegradasi harga diri dan status sosial. Namun bagi orang lain di luar kelompok ini ceritanya menjadi lain; dalam situasi normal citra negatif hanya diakui ada, tetapi dalam situasi tidak normal atau sedang bumusuhan, justru citra negatif menjadi “senjata” untuk merendahkan musuh. Akibatnya terjadi konflik terbuka. Namun setelah konflik berakhir, persoalan pokok yang dihadapi adalah bagaimana transformasi sosial terbentuk ? Kalau sebelum konflik berkembang pencitraan negatif yang berujung pada konflik terbuka, pertanyaan setelah konflik berakhir adalah bagaimana pihak-pihak yang telah bertikai belajar dan berproses bersama mengkonstruksi pencitraan baru ?

Ketiga, setiap orang baik kelompok atau individu tidak ingin mendapat citra negatif, namun kenyataannya tidak mungkin. Karena dalam masyarakat ada sebuah sistem yang berjalan

tanpa disadari, yaitu seseorang atau sekelompok orang ingin menghindar dari citra negatif, sementara orang-orang lainnya selalu berkecenderungan untuk mencari-cari dan menilai orang atau kelompok lain dengan memanfaatkan sisi negatifnya – kemudian menyepelkan atau merendehkannya. Dengan demikian konflik tetap sulit dihindari. Semua pihak memang tidak ingin berkonflik dengan pihak lain, namun kenyataannya dikehendaki atau tidak pasti datang dengan sendirinya. Di satu pihak konflik tidak dikehendaki, tetapi di lain pihak dikehendaki atau tidak konflik pasti terjadi, tanpa diundang. Maka poin yang ingin dibahas adalah bagaimana melihat konflik sebagai sebuah realitas yang kemudian dikelola secara kreatif dan dijadikan sebagai instrumen afirmatif atau penegasan diri identitas di tengah pluralitas identitas yang lain ? Melalui konflik terjadi proses penyadaran – transformasi identitas sosial yang pada akhirnya tercipta penerimaan atau afirmasi.

Keempat, dalam memahami konflik sebagai instrumen afirmasi, di mana melalui konflik tercipta pengakuan, penerimaan dan penghargaan, setiap identitas menyadari dirinya berbeda justru setelah mengalami persinggungan atau gesekan dengan identitas lain. Kemudian dalam situasi normal keberbedaan disadari justru pada saat hidup berdampingan dengan identitas lain. Dalam hal ini pengakuan terhadap realitas konflik merupakan potensi dasar untuk merubah cara pandang terhadap konflik, dari sesuatu yang sangat negatif ke hal yang lebih positif dan optimis. Maka poin utama yang dibahas adalah bagaimana melihat konflik sebagai instrumen afirmasi ? Dan untuk menjaga bergulirnya proses transformasi sampai tahap afirmasi dibutuhkan rekayasa sosial. Rekayasa sosial terjadi pasca konflik, di mana terdapat tahap *peace-building* dan *peace-making*. Untuk itu pertanyaan yang akan dibahas adalah bagaimana rekayasa sosial dilakukan sehingga tujuan akhir proses damai dapat terwujud ? Atau bagaimana peran para aktor rekayasa sosial mengkonstruksi tatanan relasi yang rusak akibat konflik untuk kemudian menciptakan perdamaian secara bersama-sama ?

Kelima, untuk melakukan rekayasa sosial memang tidak mudah, apalagi mendengar kata rekayasa saja orang langsung curiga, jangan-jangan rekayasa yang dimaksudkan sama dengan yang dilakukan pemerintah dalam beberapa kasus terutama untuk menciptakan kondisi kisruh di negeri ini. Maka pertanyaannya, bagaimana menghilangkan kesan negatif dari rekayasa sosial itu ? Dan bagaimana mencermati keinginan dan kehendak pihak-pihak yang bertikai ? Yang jelas rekayasa sosial membutuhkan keterlibatan pihak-pihak yang bertikai, bahkan pihak yang bertikai harus menjadi sentral poin terselenggaranya rekayasa sosial. Hal ini penting untuk mendengar dan mendeteksi secara langsung keinginan pihak-pihak yang telah bertikai.

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Berangkat dari sebuah pemahaman bahwa konflik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup manusia, baik pada tingkat makro-sosiologis maupun mikro-sosiologis, maka sudah sewajarnya konflik tidak harus dihindari tetapi dikelola secara kreatif sehingga bisa menjadi sesuatu yang produktif menunjang keberadaan manusia di tengah pluralitas identitas hidup bermasyarakat. Sebelum mengelola konflik pertama-tama harus mengakui bahwa konflik adalah sesuatu yang positif dan perlu dalam hidup manusia. Hal ini penting sebagai motivasi dan sekaligus untuk melihat konflik secara optimis. Banyak pakar konflik dan sebagian besar masyarakat menilai konflik sebagai sesuatu yang negatif, malapetaka kemanusiaan yang dahsyat sehingga harus dihindari, apa pun alasannya. Itu memang betul. Tetapi jangan lupa; akibat penilaian yang sangat negatif terhadap konflik banyak investor politik merasa pasti berhasil memporak-poranda tatanan masyarakat kalau menggunakan konflik sebagai instrumen untuk mencapai kepentingannya. Dalam kondisi tatanan masyarakat kacau, para petualang politik akan dengan mudah mengusung tujuan politiknya. Namun sebaliknya jika masyarakat menilai konflik secara positif maka tidak akan mudah terpancing provokasi para petualang politik

untuk melakukan tindakan kekerasan dan saling membunuh. Dalam konteks ini, walaupun masyarakat berkonflik, itu berarti telah terjadi gesekan kepentingan di antara mereka sendiri dan itu wajar dalam kehidupan masyarakat pluralis seperti Indonesia.

Berdasarkan pemahaman di atas, tulisan ini tidak lain ingin mengembalikan konflik pada posisi yang sebenarnya sebagai instrumen afirmasi perbedaan kepentingan identitas. Sehingga pada posisi ini konflik tidak harus dihindari, tetapi justru dipandang perlu sebagai salah satu bentuk ekspresi keberbedaan manusia guna mencapai sebuah perubahan yang diinginkan. Terhadap konflik yang telah terjadi dibutuhkan upaya transformatif dan rekayasa sosial yang terkontrol dan dikelola dengan baik guna mengkonstruksi tatanan relasi baru, yang saling menghargai, menegaskan dan mengakui perbedaan masing-masing.

Dengan demikian kiranya bisa dipahami bahwa tujuan ini:

- Untuk mengembalikan konflik pada posisi yang sebenarnya sebagai instrumen afirmasi identitas di antara individu atau kelompok masyarakat yang berbeda kepentingan dan masing-masing diikat identitas yang berbeda pula.
- Untuk menjelaskan aspek positif dari konflik yang telah terjadi sehingga nampak bahwa konflik bukanlah tanda berhentinya sebuah kehidupan tetapi merupakan sebuah proses alamiah dalam rangka pengenalan dan penerimaan terhadap identitas yang berbeda.
- Untuk memberi masukan kepada pihak-pihak yang telah bertikai agar tidak menghabiskan energinya menyesali peristiwa yang telah terjadi kemudian merancang pembalasan, tetapi melihat konflik sebagai bagian dari proses kehidupan dalam masyarakat pluralis.
- Untuk menegaskan bahwa yang terpenting dari konflik yang terjadi adalah melihat masa depan lebih optimis, mampu memutuskan rantai belenggu masa lalu melalui rekayasa pengalaman traumatik, dan membangun kembali tatanan kehidupan yang telah rusak

akibat konflik. Jika hal ini terjadi maka akan muncul sebuah optimisme untuk menatap masa depan sambil membangun sikap saling memahami, mengakui dan menghargai perbedaan identitas masing-masing.

- Untuk menegaskan kembali bahwa konflik yang dilatarbelakangi perbedaan kepentingan identitas dalam dunia dewasa ini semakin sulit dihindari. Jika hal itu sulit dihindari maka sudah sewajarnya seluruh kemampuan kritis diarahkan pada upaya mencari alternatif lain dalam mengekspresikan kepentingan identitas yang berbeda di antara manusia, baik individu maupun kelompok.
- Untuk menunjukkan bahwa pengakuan dan penerimaan terhadap kepentingan identitas yang berbeda dari setiap warga masyarakat melalui formulasi dan rekayasa kebijakan yang konkret dari pemerintah merupakan salah satu langkah penting dalam upaya menciptakan perdamaian pasca konflik.

Itulah tujuan yang ingin dicapai dari tulisan ini. Dalam pembahasan berikutnya tujuan ini mungkin berkembang, tergantung data dan informasi yang saya peroleh.

KERANGKA PEMIKIRAN

Memahami Konflik

Ada banyak sekali varian pemikiran yang berusaha menjelaskan dan memahami konflik namun secara sederhana bisa dikatakan bahwa konflik adalah kondisi di mana dua atau lebih pelaku yang berupaya untuk mencapai tujuannya sendiri dengan mengabaikan atau meniadakan upaya pencapaian tujuan dari pihak lain¹. Atau kata lain, konflik adalah dua atau lebih pelaku yang saling berhadapan dan saling memperjuangkan kepentingannya masing-masing.

¹ Lihat, Annabel McGoldrick dan Jake Lynch, *Peace Journalism: How to Do it ?* Diterjemahkan Ign. Haryanto, 2001, *Jurnalime Damai: Bagaimana Melakukannya ?*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) dan The British Council: Jakarta, hlm. 2

Pengertian ini mungkin belum menjelaskan apa-apa mengenai konflik. Untuk itu berikut ini perlu dijelaskan pendapat beberapa tokoh mengenai konflik.

Christ Mitchell (1981) memahami konflik sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih, yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan². Sementara Kenneth Boulding (1962) mendefinisikan konflik sebagai sebuah situasi berkompetisi di mana kelompok-kelompok menyadari adanya ketidaksesuaian atas posisi potensial di masa depan karena bertentangan dengan keinginan kelompok lainnya³. Baik Mitchell maupun Boulding nampaknya hanya berbicara berkaitan dengan potensi konflik yang bisa terjadi di masa depan, dalam pengertian, belum terjadi konflik terbuka, tetapi benih-benih konflik sudah ada dan itu bisa dipahami sebagai konflik.

Jika pengertian konflik menurut Michell dan Boulding lebih bersifat antisipatif, Burton (1990) justru melihat konflik sebagai situasi yang sudah bergerak jauh melampaui kompetisi dan telah terjadi perilaku kekerasan yang bersifat merusak⁴. Perilaku kekerasan bisa dilakukan oleh individu, kelompok maupun bangsa sebagai akibat adanya ketidaksesuaian antara apa yang dikehendaki dengan kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan sosial dan dalam hubungan perekonomian sehari-hari.

Sementara menurut Edward Azar (1991) konflik muncul ketika terdapat pertentangan tujuan diantara kelompok dan terjadi di tengah-tengah kurangnya koordinasi dan buntunya mekanisme mediasi. Sehubungan dengan ini Azar memperkenalkan teori *protracted social conflict* (PSC) dalam bukunya yang berjudul, *The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases* (1990). Dalam buku ini Azar menyampaikan ketidakpuasannya terhadap teori

² Lihat, Christ Mitchell, 1981, "The Structure of Internasional Conflict", London: MacMilan, Bab I dala Fisher, Simon, et.al, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, 2001, The British Council, Indonesia: S.N. Karikasari, et.al., hlm.4

³ Lihat, Kenneth Boulding, 1996, *Conflict and Defense: A General Theory*, 1962, New York, Harper dan Raw dalam Abdollah Ramezanzadeh, hlm. 17

⁴ Lihat J. Borton, 1996, *Resolution and Prevention*, New York: St. Martin's Press, 1990. Dalam Ramezanzadeh, hlm. 17

konvensional dalam menginterpretasi konflik-konflik yang terjadi sejak berakhirnya Perang Dingin⁵. Berkaitan dengan buntunya mekanisme mediasi dan tidak tersedianya alternatif lain, Annabel McGoldrick dan Jake Lynch melalui tesis utamanya dalam buku: *Peace Journalism: How to Do It ?* mengatakan, “semakin banyak pilihan, semakin sedikit terjadinya kekerasan”⁶. Annabel dan Jake Lynch mengambil contoh mengenai konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, di mana ada banyak sekali konflik yang berakhir dengan negosiasi, bukan dengan kekerasan. Hal ini mengandaikan tersedianya banyak pilihan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa resolusi konflik juga bisa tercapai melalui kemajuan menggunakan kreativitas sebagai alat yang belum pernah terpikirkan untuk mencapai titik yang lebih maju atas isu-isu mendasar yang menyulut terjadinya konflik. Isu-isu ini ditransformasi agar dapat ditinjau dan ditelaah dengan cara pandang baru⁷.

Selain Azar, Annabel dan Jake Lynch, Reyhler menilai bahwa untuk memahami konflik pertama-tama perlu mengetahui isu-isu yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Reyhler membedakan konflik ke dalam enam tipe isu, yaitu isu yang berhubungan dengan definisi situasi (isu konflik), isu yang berhubungan dengan kepentingan (isu kepentingan), isu data, isu mengenai nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, isu identitas kolektif, dan isu irasional⁸. Isu-isu ini turut menentukan pemahaman orang terhadap konflik, katanya.

Hal yang kurang lebih sama diungkapkan Irwan Abdullah, seorang antropolog Indonesia. Abdullah menyebut isu konflik dengan istilah “pola konflik”. Pola konflik yang dimaksudkan Abdullah berangkat dari pengalaman konflik yang telah terjadi di berbagai tempat di Indonesia.

⁵ lihat Edward Azar, et.al, 1978, *Protracted Social Conflict: Theory and Practice* in Middle East Journal of Palestine Studies, Vol.8: No.1, hlm. 50 dan dalam Bob S. Hadiwinata, bahan kuliah, Pengkajian Strategis dan Perdamaian, Program Pasca-Sarjana Fisip Unpar semester genap, 2001

⁶ Annbel McGoldrick dan Kaje Lynch, *Peace Journalism: How to Do It ?*, terjemahan, *Jurnalisme Damai: Bagaimana Melakukannya ?*, Lembaga Studi Pers dan Pembagunan (LSPP) dan The British Council, Jakarta, 2002, hlm. 5-6

⁷ *ibid.*,

⁸ lihat Reyhler, et.al, 1995, “Een Wereld Velig Voor Conflict Handboek Vredesonderzoek”, Leuven and Apledom, Garant. Dalam Abdollah Ramezanzadeh, *Internal and International Dynamics of Ethnic Conflict: The Case of Iran*, Katholieke Universiteit, Leuven, 1996, hlm. 19

Mengetahui pola konflik menurutnya sangat membantu dalam proses resolusi konflik. Atau dengan kata lain, melalui pemahaman yang tepat terhadap pola konflik, para mediator akan lebih mudah mengidentifikasi, melokalisir dan merancang upaya pengakhiran konflik. Selain Irwan Abdullah, Selo Soemardjan juga menjelaskan konflik di Indonesia (konflik etnis) sebagai konflik antar suku⁹, di mana konflik ini dapat terjadi apabila: (1) ada dua suku yang hidup berdampingan; (2) dalam hubungan sosialnya terjadi interaksi; dan (3) dalam interaksi itu dirasakan oleh salah satu atau kedua pihak bahwa ada unsur yang bertentangan, ada ketimpangan sosial (satu kelompok mendominasi kelompok lain), atau ada sumber penghidupan yang menjadi rebutan.

Menurut Ramezanzadeh, kebanyakan konflik tidak dibatasi oleh hanya satu isu, tetapi oleh berbagai isu yang bersifat multi-dimensi. Tambahan pula, isu-isu ini dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu, dan khusus untuk konflik internal negara isu konflik merupakan “*mixed-motive*”, dalam pengertian, isu yang dibahas sangat beragam dan kelompok yang terlibat di dalamnya pun memiliki kepentingan yang beragam pula; kooperatif maupun kompetitif. Isu yang sangat beragam ini secara langsung mempengaruhi pola-pola konflik, dan pola-pola ini secara kombinasi menentukan terjadinya konflik, baik secara subyektif maupun obyektif atau secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Selain itu pola-pola konflik juga mau menjelaskan bahwa konflik bukan hanya disebabkan oleh adanya perbedaan kultur antara orang atau kelompok, tetapi juga oleh berbagai kerangka yang memberi artikulasi yang tidak proporsional atas perbedaan satu pihak dengan pihak lain¹⁰. Lebih lanjut Ramezanzadeh mengklasifikasikan konflik ke dalam dua kategori utama, yaitu: (1) *non-violent conflict*: konflik yang tidak destruktif;

⁹ lihat, Selo Soemardjan, *Konflik Antar Suku di Indonesia*, Kompas, 22 Maret 2001, hlm. 4

¹⁰ lihat Irwan Abdullah, *Resolusi Konflik Etnis di Indonesia: Suatu Kerangka Konseptual*, makalah disampaikan dalam Workshop Resolusi Konflik Etnis di Sumatera Utara, dilaksanakan oleh Ethnic Conflict Resolution Studies Network (ECRSN), Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, Medan, 8-9 Maret 2002

dan (2) *violent conflict*: konflik destruktif¹¹. Konflik terorganisir dalam kekerasan yang sistematis dan diterapkan sebagai salah satu instrumen kebijakan.

Selanjutnya Burton, sebagaimana dikutip Ramezanzadeh, membedakan konflik secara khusus, baik yang bersifat *violent* maupun *non-violent* ke dalam enam tahapan, yaitu konflik laten, perselisihan, protes, kerusuhan, pemberontakan, dan perang konvensional pada skala rendah. Konflik laten, perselisihan dan protes dikategorikan dalam konflik yang bersifat *non-violent* (tidak merusak), dan tiga tahapan berikutnya: kerusuhan, pemberontakan, dan perang konvensional termasuk konflik yang destruktif¹².

Berkaitan dengan konflik yang telah terjadi dan telah menghancurkan harta benda maupun jiwa, ada dualisme situasi pasca konflik, yaitu di satu pihak muncul kedengkian, amarah, sakit hati, menutup segala upaya negosiasi, dan selalu sibuk menyusun strategi balas dendam, dsb. Kondisi inilah yang mendorong kelompok atau komunitas untuk terjun lagi dalam konflik yang sama. Inilah aspek negatif dari konflik. Namun di pihak lain orang juga menilai bahwa situasi pasca konflik adalah situasi yang penuh dengan penyesalan, sadar akan kekeliruan yang telah dilakukan dan berkomitmen untuk tidak ingin terjebak lagi pada persoalan yang telah terjadi. Inilah aspek positif dari konflik, karena mendorong kelompok atau komunitas untuk belajar mengenal siapa diri dan kelompoknya dan siapa kelompok lain yang hidup berdampingan dengannya. Hal ini dengan sudut pandang yang berbeda disampaikan Jandt dan Pederson (1996: 4) bahwa konflik pada hakekatnya terdiri dari dua jenis, yaitu "negatif" dan "positif". *Pertama*, negatif yaitu segala bentuk konflik yang disfungsional di mana aktor-aktor yang terlibat di dalamnya dapat secara membabi-butu berusaha saling menghancurkan. Segala upaya negosiasi untuk secepatnya mengakhiri konflik ditutup rapat-rapat, dan yang ada hanyalah upaya balas dendam sehingga konflik menjadi mustahil untuk diselesaikan. *Kedua*, positif yaitu setiap

¹¹ Abdollah Ramezanzadeh, 1996, op.cit., hlm. 19

¹² J. Burton, 1996, op.cit., hlm. 19

bentuk konflik apabila dikelola secara kreatif dapat menghasilkan konsensus dengan mengembangkan sikap dialogis yang pada akhirnya dapat menegakkan perdamaian¹³.

Dalam upaya resolusi konflik juga dikenal berbagai macam istilah, di antaranya penyelesaian konflik (tercapainya kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bertikai), manajemen konflik atau regulasi konflik (meliputi seluruh penanganan konflik secara positif), resolusi konflik (istilah komprehensif berkaitan dengan penanganan konflik), dan transformasi konflik¹⁴ (mentransformasi hubungan sosial yang tidak adil, yang menyebabkan terjadinya konflik melalui konflik itu sendiri). Khusus dalam upaya transformasi, konflik dilihat secara positif, dalam pengertian, melalui konflik terjadi perubahan tatanan sosial dari yang tidak adil ke yang lebih adil. Transformasi bermakna sebuah urutan langkah-langkah transisi yang sangat diperlukan pihak-pihak yang bertikai guna memasuki tatanan hubungan sosial yang lebih damai, di mana unsur-unsur yang berbeda terintegrasi di dalamnya. Aspek inilah yang penulis ingin perhatikan secara khusus pasca konflik di Kalimantan Barat, khususnya Sambas.

Kemudian untuk mengetahui siapa saja atau kelompok mana saja yang biasanya terlibat konflik, secara garis besar ada dua wilayah yang perlu dibedakan, yaitu konflik di level negara (antar negara) dan konflik di dalam negara (internal negara). Untuk konflik di level negara, yang saling berhadapan adalah negara vs negara dengan berbagai motif dan kepentingan. Sedangkan untuk konflik internal negara, kelompok-kelompok yang saling berhadapan dan terlibat konflik adalah masyarakat vs pemerintah, organisasi vs organisasi, organisasi vs militer, masyarakat vs masyarakat. Dan dalam konflik di mana masyarakat saling berhadapan (masyarakat vs masyarakat) biasanya dibagi lagi menjadi kelompok dalam atau komunitas sendiri atau penduduk asli (*insiders*) vs kelompok luar atau komunitas lain atau pendatang

¹³ Lihat Bob S. Hadiwinata, *Konflik dalam Perspektif Teoretis dan Historis*, op.cit.,

¹⁴ Lihat, Hugh Miall, Oliver R, Tom, 1999, *Contemporary Conflict, Resolution*, Cambridge: Polity Press, hlm. 56-59

(*outsiders*), penduduk asli vs penduduk asli (*ethnic clash*), penganut agama vs penganut agama (*believers vs believers*)¹⁵.

Konflik Pasca Perang Dingin

Varian pemikiran mengenai konflik menurut beberapa tokoh di atas bisa dimaklumi karena mereka datang dari jaman yang berbeda dan cara melihat persoalan pun berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Penulis tidak ingin larut dalam berbagai pandangan itu, namun satu hal telah terjadi, yaitu pergeseran pola konflik, dari konflik antar-negara ke konflik internal negara. Konflik internal negara mulai marak terutama setelah berakhirnya Perang Dingin tahun 1990, yang diawali dengan terjadinya distribusi geografis konflik kekerasan. Pada awalnya (awal abad 20 sampai pertengahan), konflik kekerasan skala besar kebanyakan terjadi di Eropa dengan melibatkan dua blok besar, Timur dan Barat, namun kemudian mengalami perubahan karena mulai melibatkan negara-negara besar dan kecil di luar Eropa. Misalnya, negara-negara di kawasan Amerika Latin, Asia dan Afrika. Setelah berakhirnya Perang Dingin, distribusi geografis konflik semakin tersebar ke berbagai kawasan di Asia, Timur Tengah dan Afrika. Melihat kondisi ini, para peneliti perang seperti Buzan (1991), Kacowicz (1995), dan Holsti (1996) kemudian membagi dunia ke dalam dua wilayah besar, yaitu (1) *zone of peace* (daerah perdamaian), yang meliputi wilayah-wilayah seperti Amerika Utara, Eropa Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, Karibia, dan Pasifik Selatan; dan (2) *zone of war* (daerah perang), yang meliputi wilayah-wilayah seperti Timur Tengah, Amerika Tengah, Asia Selatan,

¹⁵ Farsijana Adeney Risakotta, *Mobilising Konflik through Media in the North Moluccas*, Makalah Workshop: "Conflict and Media Analysis and Conflict De-escalating Radio Programming in Indonesia, diselenggarakan Indonesian Conflict Studies Network/UNESCO Local Radio Network International Media Suport/Embassy of Finland" di Unpar, 7-12 April 2003

Afrika, Rusia, dan Balkan¹⁶. Yang mengkhawatirkan dari terjadinya distribusi geografis konflik kekerasan ini adalah 90 persen lebih dari 186 peperangan antara tahun 1945 sampai 1994 terjadi di wilayah negara berkembang. Jumlah ini pun dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan, dari rata-rata 12 peperangan per-tahun pada dekade 1950-an menjadi 22 peperangan dekade 1960-an; 32 peperangan pada dekade 1970-an; dan 40 peperangan pada dekade 1980-an¹⁷.

Pergeseran pola konflik ternyata berhasil merebut perhatian para pakar, di antaranya Kaldor dan Vashee yang mencoba mengidentifikasi konflik pasca Perang Dingin dengan mengemukakan ciri-ciri sebagai berikut: (1) memperjuangkan tujuan politis yang tidak semata-mata berkaitan dengan kebijakan luar negeri, tetapi lebih berkaitan dengan persoalan konsolidasi kelompok-kelompok etnis yang heterogen; (2) memperjuangkan ideologis yang tidak lagi berbicara tentang demokrasi, fasisme atau sosialisme, tetapi lebih mendasarkan pada semangat tribalisme dan identitas komunal; (3) bertumpu pada mobilisasi massa yang tidak lagi digerakan oleh patriotisme, tetapi lebih mengandalkan pada perikatan religius, rasa waswas dan keinginan untuk mandiri; (4) bergantung pada dukungan eksternal yang tidak harus datang dari negara adikuasa, tetapi dari kekuatan-kekuatan diaspora seperti kelompok mafia, dan kekuatan regional/lokal; (5) terfragmentasi dan terdiferensiasi, tidak lagi bertumpu pada penggunaan senjata militer yang canggih, melainkan lebih mengandalkan kelompok para militer, milisi, geng, kelompok kriminal, dan provokator yang tidak segan-segan melakukan penyiksaan, aksi teror, pemerkosaan, penjarahan, dll; dan (6) tidak lagi dibiayai resmi oleh negara melalui pajak dan sumber pendapatan lainnya, tetapi dibiayai oleh sumber-sumber yang tidak resmi seperti

¹⁶ upaya para peneliti ini sangat membantu untuk melihat arus penyebaran konflik kekerasan diberbagai kawasan dan sekaligus melihat intensitasnya dari waktu ke waktu. Bisa dilihat dalam Bob S Hadiwinata, bahan kuliah *Pengkajian Strategis dan Perdamaian* di Program Pasca-Sarjana Fisip Unpar, semester genap 2002

¹⁷ lihat dalam Diatrach Jung, et.al, 1996, *Ongoing Wars and Explanation*". Dalam Luc van der Goor, et.al. (eds.). *Between Development and Destructio: An Inquiry into the Cause of Conflict in Post-Colonial States*. London: MacMillan, hlm. 52, dan dalam Bob S. Hadiwinata, bahan kuliah *Pengkajian Strategis dan Perdamaian* di Program Pasca-Sarjana Fisip Unpar, semester genap 2002, loc.cit

penyelundupan, penjualan obat terlarang, penipuan, pencucian uang (*money laundering*), perampokan, penjarahan, dll (Kaldor dan Vashee, 1997: 7-19)¹⁸.

Selain itu Susan Olzak (1992) dalam bukunya yang berjudul, *The Dynamics of Ethnic Competition and Conflict* juga melakukan hal yang sama. Ia menilai, konflik domestik di negara berkembang pasca Perang Dingin bertumpu pada hal-hal berikut: (1) konflik warisan kolonial yang mendapat momentumnya kembali; (2) kebangkitan radikalisme seperti agama, etnis, suku, adat-istiadat, dll; dan (3) kemiskinan atau kegagalan pembangunan¹⁹. Lebih lanjut dikatakan bahwa yang mempercepat terjadinya proses konflik di negara berkembang adalah meningkatnya peredaran senjata api ilegal, banyaknya tentara bayaran (*profesional military*), dan berkuasanya pemimpin suku (*warlordism*) yang sekaligus berperan sebagai pemimpin perang antar etnis.

Kemudian kalau melihat latar belakang munculnya konflik antar faksi atau kelompok dalam satu negara umumnya mempersoalkan perbedaan yang sifatnya sangat primordial, seperti etnis, agama, suku, ras, adat-istiadat, bahasa, dsb. Tendensi perikatan primordial ini dikembangkan oleh Clifford Geertz (1996: 43-4), terutama sejak awal dekade 1990-an. Untuk memahami faktor-faktor itu lebih jauh saya akan menjelaskannya sebagai berikut: *Pertama, hubungan darah*, yaitu suatu komunitas yang diikat oleh hubungan biologis (kekeluargaan dan kekerabatan) di mana setiap individu di dalamnya mengidentifikasi diri sebagai bagian dari suatu keluarga besar. Sebagai contoh banyak ditemui di masyarakat Afrika dan Asia. *Kedua, perikatan ras*, yaitu suatu komunitas yang dipersatukan oleh kesamaan ethno-biologis yang ditampilkan dalam ciri-ciri fisik yang sama seperti warna kulit, jenis rambut, bentuk wajah, dll. Diaspora kelompok ras tertentu ini dapat ditemui pada warga Cina yang tersebar di Asia Tenggara, India, Eropa atau Afrika di Amerika, Yahudi di di Eropa, dll. Mereka biasanya

¹⁸ lihat dalam, Bob S. Hadiwinata, *Pengkajian Strategis dan Perdamaian*, (bahan kuliah), Program Pasca-Sarjana Fisip Unpar, semester genap, 2001

¹⁹ lihat, Olzak Susan, 1992, *The Dynamics of Ethnic Competition and Conflict*, Stanford: Stanford University Press

ditempatkan sebagai kelompok minoritas di negara-negara tertentu dan tak jarang memicu berbagai konflik rasial. *Ketiga, perikatan bahasa.* Bahasa memang seringkali berfungsi sebagai pengikat persatuan antar komunitas, tetapi bahasa juga seringkali berperan sebagai sumber konflik seperti terjadi di Afrika dan Asia Selatan (India, Pakistan dan Sri Lanka). Pemaksaan bahasa kelompok tertentu sebagai bahasa nasional kerap kali menimbulkan ketidakpuasan dari kelompok etnis lain yang kemudian berkembang menjadi konflik kekerasan. *Keempat, perikatan wilayah,* yaitu perikatan yang didasarkan pada kesamaan wilayah. Perikatan ini kerap kali menjadi salah satu sumber konflik, baik dalam masyarakat pluralis maupun homogen. Fanatisme daerah yang dimiliki kelompok tertentu biasanya berkembang menjadi semangat kedaerahan yang sempit dengan diwarnai *stereotype* tertentu terhadap orang-orang dari daerah lain. Sebagai contoh terjadi di India, Pakistan dan Indonesia. Dan dalam masyarakat homogen terjadi di Korea Selatan yang juga terbagi ke dalam kelompok kedaerahan “utara” dan “selatan”. *Kelima, perikatan agama.* Persoalan agama merupakan sumber konflik yang paling potensial di berbagai kawasan dunia. Sebagai contoh yang paling jelas dari konflik agama dalam skala besar adalah Partisi India-Pakistan pada dekade 1950-an. Dan pada skala yang lebih kecil, konflik agama terjadi di berbagai kawasan Asia seperti India (Hindu vs Muslim dan Hindu vs Shikh); Phillipine (Pemerintah vs separatis Muslim); dan Indonesia (Muslim vs Kristen). Sementara di Balkan konflik agama bercampur aduk dengan perbedaan etnis seperti terjadi di Bosnia-Herzegovina dan Kosovo. *Keenam, perikatan adat-istiadat.* Selain kelima faktor di atas, komunitas juga diikat berdasarkan persamaan adat-istiadat dan norma-norma yang dianut. Di dalam praktik kehidupan sehari-hari konflik adat-istiadat seringkali terjadi menyertai konflik etnis dan wilayah karena pihak-pihak yang terlibat di dalamnya biasanya mempersoalkan perbedaan nilai, norma dan kebiasaan. Dalam masyarakat yang terdiri dari mayoritas dan minoritas, kaum mayoritas biasanya

“mendominasi” norma-norma yang berlaku sehingga membuat norma dan kebiasaan kaum minoritas menjadi tersubordinasi²⁰.

Selain tokoh-tokoh di atas, Edward Azar juga berupaya mengidentifikasi konflik pasca Perang Dingin, seperti yang terjadi di Libanon, Sri Lanka, Philippines, Irlandia Utara, Ethiopia, Israel, Sudan, Cyprus, Iran, Nigeria dan Afrika Selatan sebagai konflik yang berada di luar cara pandang konvensional. Jika pada masa sebelum Perang Dingin para pakar secara konvensional mengkaitkan konflik dengan persoalan kebijakan luar negeri, perebutan kekuasaan, keamanan, harga diri, dan sistem pemerintahan, maka pasca Perang Dingin dimensi konflik semakin luas, termasuk persoalan identitas primordial. Azar menilai bahwa konflik-konflik pasca Perang Dingin tahun 1990 lebih tampak sebagai sebuah *protracted social conflict* (konflik sosial berkesinambungan), dalam pengertian, hubungan permusuhan yang berlangsung dalam jangka waktu relatif lama dan diwarnai perang terbuka secara sporadis yang frekuensi maupun intensitasnya berjalan secara fluktuatif²¹. Konflik-konflik ini melibatkan kelompok-kelompok komunal yang saling memperjuangkan kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti keamanan, pengakuan identitas, penerimaan eksistensi, akses terhadap lembaga-lembaga politik, dan partisipasi ekonomi²².

Konflik internal negara jika dilihat dari ruang lingkup geografisnya memang sangat kecil, hanya dalam satu wilayah negara, bahkan tidak semua komunitas masyarakat dalam negara tersebut terlibat konflik. Namun melihat akibat yang ditimbulkannya bisa menyita perhatian semua warga masyarakat, termasuk dunia internasional. Dalam studi hubungan internasional, fenomena keterkaitan internasional konflik internal negara (domestik) ini dipahami sebagai

²⁰ *ibid.*,

²¹ lihat Edward Azar, et.al, 1978, *Protracted Social Conflict: Theory and Practice* in Middle East Journal of Palestine Studies, Vol.8: No.1, hlm. 50 dan dalam Bob S. Hadiwinata, bahan kuliah, Pengkajian Strategis dan Perdamaian, Program Pasca-Sarjana Fisip Unpar semester genap, 2001

²² lihat Edward Azar, 1991, *The Analysis and Management of Protracted Social Conflict*, Aldershot, in Volkan, Montville and Julius, hlm. 93

konsekuensi logis dari semakin intensifnya interaksi antar negara dan besarnya ketergantungan (*interdependency*) negara satu dengan yang lain pasca Perang Dingin. Sehubungan dengan ini Ramezanzadeh, yang merujuk pada teori *protracted social conflict* dari Edward Azar menjelaskan tujuh aspek yang memunculkan keterkaitan itu, yaitu: (1) penyebaran arus demokrasi; (2) perhatian utama dunia internasional terhadap isu Hak Asasi Manusia; (3) ambisi negara-negara untuk mendapatkan kekuasaan atas suatu wilayah negara tertentu; (4) sehubungan dengan batas-batas negara di mana konflik etnis domestik dapat memberi efek kepada negara tetangga; (5) perjuangan atas sebuah ideologi yang pada umumnya adalah agama; (6) beberapa kondisi dimana konflik etnis domestik sebenarnya dipicu oleh kekuatan internasional, sehingga gerakan etnis dan agama pun bergantung secara total pada kekuatan internasional tersebut; dan (7) masalah pengungsian dan gerakan massa²³. Keterkaitan internasional konflik domestik kemudian menjadi semakin nampak dalam era globalisasi di mana melalui globalisasi informasi suatu negara tidak bisa luput dari perhatian negara lain, termasuk perhatian terhadap konflik. Maka sejalan dengan itu konflik domestik pun akhirnya menjadi salah satu obyek kajian penting dalam studi hubungan internasional. Bahkan kajian konflik domestik menjadi semakin penting dan aktual sejalan dengan meningkatnya jumlah konflik di setiap negara. Fenomena ini memberikan isyarat bahwa konflik internal negara pun tidak lebih kecil pengaruhnya dibandingkan dengan konflik antar negara.

Konflik tidak sama dengan Kekerasan

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa perlu membedakan konflik dengan tindakan kekerasan. Konflik adalah sesuatu yang alamiah, positif, konstruktif dan membuka peluang

²³ Abdollah Ramezanzadeh, 1996, *Internal and International Dynamics of Ethnic Conflict: The Case of Iran*, Katholieke Universiteit Leuven, hlm. 35

terjadinya perubahan bila dikelola secara kreatif dan efektif²⁴. Konflik biasanya muncul dalam situasi di mana sumber-sumber ekonomi terbatas (kemiskinan, sulit mencari lapangan pekerjaan, perumahan, air bersih) dan tertutupnya peluang dialog. Selain itu, pihak-pihak yang bertikai juga memiliki persepsi yang salah tentang pihak lain; adanya ketidakpercayaan terhadap pihak lain, adanya persoalan yang tidak diselesaikan di masa lalu, pihak yang bertikai tidak menghargai hubungan di antara mereka, dan kekuasaan tidak dibagi secara merata²⁵. Kondisi-kondisi ini bisa memicu terjadinya konflik dengan kekerasan jika tidak segera ditangani.

Sedangkan kekerasan dibagi lagi menjadi kekerasan langsung, kekerasan kultural, dan kekerasan struktural. **Kekerasan langsung** – apabila individu atau kelompok menyakiti atau membunuh orang lain dengan cara memukul, melukai, menusuk, menembak, membom, dan memperkosa. **Kekerasan kultural** – melalui citra atau cerita yang membenarkan atau memuja kekerasan dengan membuat tulisan yang menuturkan kebencian; xenophobia (kebencian terhadap orang asing); kompleks penyiksaan (*persecution complex*); mitos dan legenda tentang pahlawan perang; agama sebagai pembenaran untuk perang; dan perasaan sebagai “kelompok terpilih”. **Kekerasan struktural** – tidak sepenuhnya bisa dijelaskan sebagai kekerasan yang sengaja dilakukan oleh individu; terbentuk dalam kebiasaan sehari-hari atau praktik-praktik umum di mana dalam kelompok atau organisasi selalu menggunakan argumentasi, seperti “setiap orang toh melakukannya” atau “kita sudah terbiasa melakukannya dengan cara seperti itu”. Selain itu kekerasan struktural juga bisa berupa kemiskinan; sistem yang berdasar pada eksploitasi (ekstrim = perbudakan); kesenjangan pemilikan materi; sistem perbedaan berdasarkan ras (*apartheid*); rasisme yang terlembaga; kolonialisme; korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); struktur kekerasan vertikal, termasuk eksploitasi ekonomi, represi politik dan

²⁴ Annbel McGodrick dan Jake Lynch, 2002, *Jurnalisme Damai: Bagaimana Melakukannya ?* (Seri Jurnalisme Damai), kerja sama Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) dan The British Council: Jakarta, hlm. 2-3

²⁵ *ibid.*,

pengasingan budaya; dan struktur kekerasan horisontal yang membuat orang tetap hidup bersama walaupun hendak memisahkan diri, atau sebaliknya orang dipisahkan padahal mereka ingin hidup bersama²⁶.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa dampak kekerasan itu tidak bisa diukur hanya dengan melihat kerusakan fisik, kehancuran, dan kematian saja. Kekerasan juga bisa terjadi dalam kondisi yang nampaknya biasa-biasa saja. Atau dengan kata lain, dalam seluruh hidup manusia yang namanya kekerasan, terutama kekerasan kultural dan struktural pasti selalu eksis. Berkaitan dengan masalah ini Mahatma Gandhi mengatakan: “saya menentang kekerasan karena kalau ia menunjukkan kebaikan, ia hanya merupakan kebaikan yang sementara sifatnya. Kejahatanlah yang sesungguhnya tetap ada”.

Konflik dan Gerakan Sosial-Massa

Menurut Dahrendorf akselerasi konflik sangat dipengaruhi oleh peran para aktor dalam organisasi yang didukung ideologi dan kepentingan tertentu. Benturan kepentingan seperti perebutan status, kekuasaan, dan materi di antara para aktor yang ada memunculkan konflik. Bentuk konflik seperti ini umumnya terjadi di kalangan elit politik. Namun karena para elit merasa tidak mampu mencapai tujuan politiknya dengan mengandalkan kekuatan sendiri maka massa atau anggota organisasi yang didukung oleh ideologi yang sama dimobilisasi guna memberikan tekanan pada kelompok lain yang berbeda kepentingan atau aliran politik. Berkaitan dengan ini perlu disadari bahwa tidak semua massa yang dimobilisasi mengerti apa yang diperjuangkan. Bagi elit politik – itu tidak penting – yang terpenting bisa memobilisasi massa sebanyak-banyaknya dan mampu memberikan tekanan yang berarti pada kelompok lawan. Dalam situasi masyarakat yang normal cara-cara yang digunakan mengikuti aturan yang telah disepakati

²⁶ *ibid.*,

bersama dalam undang-undang yang berlaku, namun karena ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan undang-undang yang berlaku maka dilakukanlah cara-cara yang ilegal²⁷. Dan cara-cara ilegal inilah yang merubah wujud konflik di kalangan elit menjadi kekerasan kolektif atau massal di dalam masyarakat.

Kenyataan menunjukkan bahwa kekerasan kolektif yang terjadi menimbulkan rasa takut atau was-was dalam masyarakat, terutama lawan kelompok yang dijadikan sebagai sasaran tindakan kekerasan. Namun rasa takut pada kelompok lawan hanya sebagai reaksi spontan ketika mendapat tekanan atau serangan mendadak dari kelompok lain. Selanjutnya rasa takut itu mengkrystal menjadi sebuah komitmen bersama di kalangan anggota untuk kemudian melakukan pembalasan. Para anggota yang terlanjur terlibat dalam konflik kolektif dalam dirinya muncul sebuah kesadaran baru seperti keberanian dan meningkatnya solidaritas kelompok. Bahkan individu-individu yang terlibat dalam konflik kolektif lama-kelamaan larut dalam berbagai perilaku kekerasan di mana dia tidak mampu lagi mengontrol dirinya. Hal yang sama dikemukakan Gustave Le Bon dengan menyebut beberapa ciri gerakan kolektif, seperti memiliki efek penularan (*contagion effect*) yang sangat cepat, seolah-olah para anggota yang melakukan gerakan itu dihipnotis (*suggestability*), para anggota seakan-akan hilang identitas dirinya dan yang muncul adalah identitas kelompok (*anonymity*)²⁸.

Gerakan sosial-massa ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya: (1) daya dukung struktural (*structural condusiveness*) di mana suatu gerakan sosial-massa akan mudah terjadi dalam lingkungan atau masyarakat tertentu yang memang berpotensi untuk melakukan gerakan massa secara spontan dan berkesinambungan; (2) adanya tekanan-tekanan struktural (*stuctural strain*) yang mendorong orang untuk melakukan gerakan massa secara spontan karena adanya

²⁷ Robert K. Merton menjelaskan hal ini dalam Marvin E. Wolfgang, Leonardo Savits dan Norman Jonhston, *The Sociology of Crime and Delinquency*, New York: John Wiley and Sons, 1970, yang kemudian disadur Riza Sihbudi dan Moch Nurhasim, *Kerusuhan Sosial di Indonesia*, PT. Grasindo: Jakarta, 2001, hlm. 30-31

²⁸ Gustave Le Bon, 1966, *The Crowd: A Study of the Popular Mind*, New York: Viking Press, hlm. 29-34

keinginan untuk melepaskan diri dari situasi yang menyengsarakan; (3) adanya sarana informasi, baik formal (media masa cetak dan elektronik) maupun informal (secara lisan dan melalui simbol-simbol adat atau tanda-tanda tertentu yang dipercayai). Informasi yang disebarkan itu akan menguatkan dan memperluas gerakan sosial-massa; (4) faktor yang bisa memancing gerakan massa karena emosi yang tak terkendali seperti rumor atau isu-isu yang bisa membangkitkan kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan atau balas dendam; dan (5) adanya upaya mobilisasi massa oleh pemimpin gerakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang telah direncanakan²⁹.

Menurut Dietrich Jung, perang khususnya di level negara dapat dikatakan sebagai konflik kekerasan massal apabila memenuhi sekurang-kurangnya tiga karakteristik, yaitu (1) dua atau lebih kekuatan bersenjata terlibat dalam pertempuran, di mana salah satunya merupakan anggota militer pemerintah yang sedang berkuasa; (2) kedua belah pihak minimal memiliki sebuah sistem komando yang menentukan strategi pertempuran; dan (3) adanya operasi bersenjata yang dilakukan secara kontinyu dan bukan sekadar konfrontasi-konfontasi sporadis semata³⁰. Dalam hal ini Jung ingin menjelaskan perang yang dikategorikan sebagai konflik kekerasan massal, dimana pihak-pihak yang berbeda kepentingan berkaitan dengan dominasi di bidang ekonomi, politik, keamanan dan budaya sudah saling berhadapan dan menggunakan kekerasan bersenjata.

Konflik Sebagai Instrumen Menciptakan Perubahan Sosial

Dalam kondisi di mana seorang individu atau kelompok mendapatkan kedudukan atau posisi yang enak dan aman, baik sebagai pejabat pemerintah maupun orang-orang yang telah

²⁹ Pendapat Nail J. Smelser dalam Ron E. Robert dan Robert Marsh Kloss, *Social Movement Between the Balcony and the Barricade*, London: The C.V Mosby Compeny, 1979 yang disadur Riza Sihbudi dan Moch. Nurhasim, *Kerusuhan Sosial di Indonesia*, op.cit. hlm. 33-34

³⁰ lihat, Dietich Jung, et.al, 1996, *Ongiong Wars and Their Explanation*, loc.cit

berhasil di bidang ekonomi umumnya cenderung memilih model konsensus. Mereka sama sekali tidak menghendaki adanya gejolak sosial dan perubahan karena gejolak sosial yang mengarah ke perubahan mengakibatkan posisinya terancam. Sebaliknya orang-orang yang tidak menduduki posisi atau jabatan yang enak dan aman cenderung memilih model konflik³¹. Konflik dalam hal ini dipahami sebagai instrumen untuk menciptakan perubahan sosial yang berarti. Konflik berperan merekonstruksi ulang tatanan sosial yang rapuh karena tatanan sosial yang ada dipandang sebagai hasil pemaksaan sekelompok kecil masyarakat (elit dalam negara) terhadap mayoritas warga masyarakat. Bagi sekelompok besar masyarakat yang kurang diuntungkan, struktur sosial semacam ini bukanlah hasil konsensus seluruh warga, apalagi persetujuan bersama mengenai nilai-nilai atau norma-norma, tetapi hasil dominasi sekelompok kecil masyarakat. Bahkan kepatuhan dan ketundukan sebagian besar warga masyarakat terhadap hukum dan undang-undang, yang merupakan ciptaan kelompok kecil atau para elit merupakan bentuk pemaksaan dan penyeragaman kepentingan identitas. Keteraturan dan keharmonisan yang ada bukanlah keteraturan yang disebabkan oleh integrasinya organ-organ identitas yang berbeda tetapi hasil pemaksaan dan kekerasan³². Oleh karena itu tatanan sosial yang demikian harus dirombak dan ditata kembali di mana di dalamnya termuat kepentingan sebagian besar warga masyarakat.

Hal ini nampak dalam pemerintahan orde baru di Indonesia di mana kepentingan untuk menunjukkan, menegaskan, mengafirmasi identitas yang beragam dikalahkan oleh kepentingan untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dari pemerintah yang berkuasa. Maka model konflik amat penting untuk menciptakan perubahan-perubahan sosial yang progresif sebagai sumber

³¹ merupakan kumpulan pemikiran beberapa tokoh seperti Ibn Khaldun (1332-1406); Machiavelli (1469-1527); Jean Bodin (1530-1596); Thomas Hobbes (1588-1679); David Hume (1711-1776); Adam Ferguson (1723-1816); Jacques Turgot (1727-1781); Adam Smith (1723-1790); Thomas Malthus (1766-1834); dan Karl Marx (1818-1883) yang berbicara mengenai "Teori Konflik". Dalam A. Suryawasita, sj, *Analisis Sosial*, makalah disampaikan dalam Workshop di Bandung, September 1996

³² *ibid.*,

potensial terciptanya tatanan baru yang lebih akomodatif, pluralis dan populis karena mengutamakan sekelompok besar warga masyarakat. Model konflik ini persis kebalikan dari model konsensus yang mencintai keamanan dan keharmonisan³³, seperti yang menjadi pola umum pengelolaan pemerintahan orde baru di masa Soeharto.

Konflik dapat menjadi komoditas yang laku dijual manakala individu atau kelompok masyarakat berada dalam kondisi ketertekanan dan kehilangan pengaruh (posisi dan kedudukan). Sebagai contoh kita bisa mengamati konflik di beberapa tempat di Indonesia. Konflik-konflik itu disinyalir dilakukan oleh berbagai pihak dengan alasan, di samping ingin menutupi kesalahan-kesalahan tindakan politik di masa lalu juga karena mengalami degradasi atau kehilangan kekuasaan. Melalui konflik diharapkan tercipta instabilitas kekuasaan dan pemerintahan yang sah dan kalau memungkinkan kelompok-kelompok yang pernah berkuasa itu ingin berkuasa kembali. Indikatornya adalah konflik terjadi secara rapih, simultan, dan para organisatornya dipastikan memiliki dukungan dana yang kuat, jaringan terorganisir, dan mengenal kelemahan-kelemahan hukum serta kemampuan jumlah aparat keamanan di lapangan³⁴.

Kondisi seperti ini bisa terjadi kapan saja, terutama di masa transisi kekuasaan dan pemerintahan. Dan lebih mendasar dari itu; dalam kehidupan bermasyarakat di mana di dalamnya ada kekuasaan negara bisa dipastikan, tidak semua kepentingan identitas bisa diakomodasi pemerintah yang berkuasa. Itu berarti konflik akan selalu melekat dalam setiap masyarakat. Masyarakat tidak akan pernah melepaskan diri dari konflik, karena konflik merupakan ekspresi ketidakpuasan dan karena itu menghendaki adanya perubahan sosial.

³³ *ibid.*,

³⁴ Berbagai artikel dan komentar beberapa tokoh di media massa.

Pareto³⁵ menjelaskan bahwa sejarah adalah perjuangan memperebutkan kekuasaan yang tidak berkesudahan. Kelompok-kelompok dominan berusaha memelihara dan mempertahankan kedudukannya melalui mobilisasi kekuatan karena kekuatan adalah faktor terpenting dalam mempertahankan stabilitas. Konflik yang menggunakan kekerasan dalam hal tertentu diperlukan untuk memulihkan keseimbangan sosial jika keseimbangan itu terganggu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa konflik yang menggunakan kekerasan adalah realitas yang tidak membutuhkan pembenaran moral, karena kekerasan memiliki kualitas pembaharuan, membebaskan manusia untuk mengikuti ketentuan yang tidak rasional dari sifat bawaannya sendiri³⁶. Bahkan pada sebagian masyarakat (subbudaya kekerasan) meraih status sosial dalam kelompoknya melalui perolehan prestasi kekerasan dan itu sangat dihargai kelompoknya³⁷.

Selain itu Gamson, seorang peneliti pernah melakukan penelitian terhadap 53 kelompok pembangkang yang muncul dalam masyarakat Amerika antara tahun 1800 dan 1845. Gamson ingin menjawab satu pertanyaan, apakah kekerasan memberikan hasil dalam aksi protes bersama? Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kelompok yang menggunakan kekerasan lebih berpeluang besar memperoleh keuntungan baru daripada kelompok yang tidak menggunakan kekerasan. Gamson juga menyatakan bahwa kekerasan lahir ketika muncul ketidaksabaran menunggu proses perubahan. Kekerasan memang tidak langsung menimbulkan perubahan, namun kekerasan dapat menimbulkan ketakutan dan ancaman yang selanjutnya dapat merangsang terjadinya perubahan dalam situasi lain.

³⁵ James H. Maesel (ed.), *Pareto and Mosca* (Prentice, 1996), hlm. 1-13 dijelaskan kembali oleh Robert H. Lauer dalam bukunya *Perspective on Social Change*, diterjemahkan *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989, dan dalam Riza Sihbudi dan Moch. Nurhasim, *Keusuhan Sosial di Indonesia*, PT. Grasindo: Jakarta, hlm.14 -15

³⁶ *ibid.*,

³⁷ Albert K. Chone, "The Delinquent Subculture", dalam Marvin E. Wolfgang, *The Sociology of Crime and Delinquency* (New York: John Wiley and Sons Inc. 1970, hlm.286-291, dan dalam Riza Sihbudi dan Moch. Nurhasim, *ibid.*,

Selain berfungsi menciptakan perubahan sosial, konflik dengan kekerasan juga dapat meningkatkan solidaritas internal seperti kebersamaan sebagai satu kelompok. Anggota kelompok yang sudah mulai kehilangan identitas diri dan kelompoknya akan terbangun kesadaran baru manakala terjadi konflik di depan matanya. Dalam kondisi ini, konflik sering kali diciptakan oleh para pemimpin kelompok untuk menimbulkan kesadaran bersama. Berkaitan dengan ini Lauer³⁸ menjelaskan bahwa konflik sangat penting bagi penentuan arah gerakan; dan solidaritas sangat penting dalam mencapai perubahan yang diinginkan. Solidaritas sosial akan makin terjamin jika konflik terjadi.

Afirmasi, Transformasi, dan Rekayasa Sosial

Selain memahami konflik penulis juga ingin menjelaskan mengenai afirmasi transformasi, dan rekayasa sosial. **Pertama**, afirmasi. Afirmasi adalah sebuah upaya penegasan atau penguatan yang mengandaikan adanya pengakuan dari pihak lain terhadap keberadaan seseorang atau sekelompok orang dengan seluruh atribut identitas sosial yang dimilikinya. Penegasan atau penguatan ini dibutuhkan manakala mendapat ancaman dari pihak lain. Dan ancaman itu bisa berupa peniadaan, penghinaan, dan pelecehan terhadap atribut identitas primordial, seperti etnis dan agama misalnya. Dalam kondisi terancam atau terhina orang bisa melakukan apa saja, termasuk membunuh sebagai ungkapan perlawanan atau tidak menerima perlakuan orang yang menghina.

Pada tataran konsep penegasan identitas ingin menyajikan sebuah data antropologis lain, di mana telah terjadi kekaburan atau kehilangan harga diri identitas³⁹, akibat dominasi dan tekanan dari identitas lain. Dalam kondisi real masyarakat, kekaburan atau kehilangan harga diri

³⁸ Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial* (Bina Aksara: Jakarta, 1989, hlm. 301 dan dalam Riza Sihbudi dan Moch. Nurhazim, *Kerusuhan Sosial di Indonesia*, op.cit., hlm.16-17

³⁹ Lihat, F. Budi Hardiman, *Bentara Esai-esai 2002*, JB Kristanto dan Nirwan Ahmad Arsuka (Ed.), Kompas: Jakarta, 2002, hlm. 86-87

identitas ini terjadi manakala sebuah identitas mendapat penghinaan atau pelecehan dari orang yang beridentitas lain. Pencitraan negatif merupakan salah satu bentuk penghinaan terhadap identitas etnis lain. Dan konflik terbuka – saling membunuh merupakan harga yang harus dibayar untuk sebuah upaya merebut kembali identitas dan harga diri yang hilang. Upaya afirmasi tidak lain untuk merebut kembali identitas dan harga diri yang kabur atau hilang itu. Maka segala sesuatu, termasuk jiwa dan harta benda bisa dipertaruhkan untuk mendapat kembali identitas itu.

Kemudian afirmatif adalah sebuah kata sifat yang mengacu pada orang atau kelompok orang yang menyetujui, di mana orang yang tadinya menghina atau menyepelkan kini bersedia menerima dan mengakui keberadaan orang lain dengan seluruh atribut identitas sosial yang dimilikinya. Ketika muncul penerimaan dan pengakuan maka ketakutan, perasaan waswas, dan curiga terhadap kelompok lain perlahan-lahan hilang – sesuatu yang tadinya hilang kini telah ditemukan kembali. Dalam hal ini ketakutan dan kecurigaan terhadap kelompok lain muncul ketika orang berada dalam kondisi terancam akan kehilangan identitas. Untuk mencapai tahap afirmatif pasca konflik memang membutuhkan waktu dan kerelaan pihak-pihak yang bertikai untuk saling menegaskan, mengakui, dan meneguhkan. Untuk itu ada empat tahap yang harus dilalui sebelum mencapai tahap afirmasi, yaitu kesadaran, penyesalan, perbaikan, dan transformasi. Untuk memelihara dan menjaga berjalannya proses ini dibutuhkan rekayasa sosial, yang akan dibahas lebih lanjut.

Kedua, transformasi. Transformasi sosial mengandaikan adanya kondisi sosial yang sakit dan menyakitkan menghalangi proses pencapaian tujuan ideal kehidupan bersama. Maka untuk mencapai kondisi ideal itu harus menembus penghalang atau mentransformasi situasi yang menyakitkan guna mencapai situasi yang dikehendai. Berkaitan dengan konflik sosial upaya menerobos atau mentransformasi hubungan sosial yang tidak adil, yang menyebabkan terjadinya

konflik melalui konflik itu sendiri. Melalui konflik, setiap kelompok masyarakat yang telah bertikai bisa belajar untuk memahami dan menyikapi berbagai persoalan yang memicu terjadinya konflik; untuk selanjutnya mengantisipasi berbagai kemungkinan sehingga tidak akan terjebak pada konflik serupa di masa yang akan datang. Transformasi merupakan pintu memasuki tahap afirmasi. Jika transformasi sosial hanya sebatas menerobos atau mentransformasi kondisi sosial yang sakit maka afirmasi mengambil peran pasca kondisi sosial yang sakit terlampaui. Melalui afirmasi terjadi penataan relasi sosial baru, di mana terjadi penegasan dan pengakuan sekalipun tetap dalam keberbedaan masing-masing.

Ketiga, rekayasa sosial. Rekayasa tidak sama dengan rekonstruksi, reproduksi, atau reinterpretasi. Jika ketiga kata ini masing-masing berarti: menata kembali, menghasilkan kembali, dan memaknai kembali, dalam pengertian, sesuatu yang sudah ada ingin diadakan kembali dengan perbaikan di sana-sini. Maka rekayasa sosial justru ingin memulai sesuatu yang belum ada menjadi ada; memutuskan rantai masa lalu dan menyusun masa depan secara bersama-sama. Hans-Georg Gadamer (1978) mengatakan bahwa sejarah efektif (*effective history*) tercipta ketika generasi sesudahnya mampu menciptakan sejarah sendiri, bukan mengulang apa yang telah terjadi. Setiap generasi bisa menciptakan sejarah sendiri dengan membebaskan diri dari prasangka dan tradisi yang membelunggunya. Prasangka dan tradisi hanya sebagai jalan menuju terciptanya sejarah baru, bukan sebaliknya, prasangka dan tradisi dijadikan satu-satunya dasar pijak untuk melangkah ke masa depan. Dengan demikian yang terjadi seharusnya bukan “mere-produksi makna” sejarah tetapi “memproduksi makna” sejarah⁴⁰.

Berkaitan dengan kondisi sosial pasca konflik, rekayasa berperan dalam memutuskan rantai pengalaman pahit masa lalu dan memulai sesuatu yang baru untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Kepentingan yang saling bertolak belakang, yang menyebabkan

⁴⁰ Lihat, Hans James, S, “Hans-Georg Gadamer and Hermeneutic Phenomenology”, 1987, dalam *Philosophy Today*, hlm. 12-14

terjadinya konflik di masa lalu dilebur ke dalam horizon atau cakrawala bersama untuk membangun masa depan. Semua kepentingan dari berbagai pihak yang bertikai diakui dan dijadikan sebagai bagian dari pengalaman hidup bersama yang memang harus terjadi dan kini saatnya untuk direlakan. Untuk merealisasikan hal ini memang membutuhkan keterlibatan pihak lain, yang dalam hal ini pemerintah setempat, tokoh masyarakat, LSM, masyarakat bisa bisa mengambil peran. Mereka selanjutnya akan disebut sebagai aktor rekayasa sosial. Namun ada catatan penting bahwa keterlibatan pihak lain hanya sebatas memfasilitasi, dalam pengertian, membantu pihak yang bertikai untuk merelakan masa lalunya yang menyakitkan dan memulai sesuatu yang baru untuk hidup di masa depan. Dengan memanfaatkan potensi kesadaran yang mengarah ke perbaikan, yang muncul di antara pihak yang telah bertikai, para aktor rekayasa berperan memaksimalkan produktivitas potensi kesadaran itu, sehingga kesadaran yang tadinya hanya dimiliki sekelompok kecil orang bisa menyebar ke lebih banyak orang atau kelompok.

Atribut “Identitas” yang Berbeda

Perkara perbedaan sebetulnya sudah selesai ketika manusia lahir dan diakui sebagai berbeda dengan manusia lain. Perkembangan lebih lanjut dalam lingkungan sosial masyarakat, atribut-atribut identitas yang menunjukkan keberbedaan, seperti kaya-miskin (ekonomi), nasionalis-sektarian (ideologi politik), Jawa, Cina, Melayu, Batak, Dayak, Madura, dll (etnis), Islam, Protestan, Katolik, Hindu Budha, Kong Hucu, dll (agama), bahasa Jawa, Sunda, Dayak Madura, dll (bahasa), dan sebagainya diperkenalkan dan diterima sebagai milik ketika manusia, entah sengaja atau tidak menjadi bagian dari identitas itu. Dalam lingkungan sosial seorang individu diperkenalkan dengan atribut-atribut ini, sehingga dia tahu siapa dirinya⁴¹. Setiap atribut

⁴¹ Disampaikan Syarif Ibrahim Alqadrie dalam workshop: Conflict and Media Analysis and Conflict De-escalating Radio Programming in Indonesia, di Unpar, Bandung, 7-12 April 2003 dan juga disinggung Farsijana Adeney-Risakotta dalam acara Workshop yang sama.

memiliki nilai dan norma tertentu yang berbeda satu dengan yang lain dengan maksud mempertegas dan menjelaskan keberadaan atribut-atribut itu sendiri. Dengan demikian, atribut-atribut identitas sesungguhnya ditentukan oleh pendapat orang lain di sekitarnya seperti teman, keluarga, komunitas maupun organisasi. Setiap individu dapat memperlihatkan identitas yang berbeda-beda sangat tergantung pada lingkungan sekitarnya. Maka kalau dipetakan, ada tiga level yang berbeda dari identitas, yaitu person, sosial, dan kolektif⁴². Identitas person menunjuk pada identitas ego, sebuah konsep diri yang mengarahkan seorang individu untuk membuat perbedaan antara dirinya dengan individu lain. Identitas sosial menekankan pada status yang diperankan seseorang di dalam interaksi sosial dan bagaimana orang tersebut diposisikan atau diperlakukan dalam interaksi sosial. Identitas kolektif digunakan oleh sekelompok orang yang diikat oleh kepentingan yang sama. Mereka menggunakan kata-kata seperti “kami” dan “mereka”⁴³ yang tidak lain untuk membedakan kelompoknya dengan kelompok lain.

Terlepas dari apakah atribut identitas ini bisa menunjukkan identitas seseorang, kalau ditanya apakah seseorang menerima atribut ini secara ikhlas atau tidak; jawabannya bisa “ya” dan bisa “tidak”. “Ya” dalam pengertian, tidak menimbulkan konflik internal dengan atribut-atribut ini dalam diri seseorang; dan “tidak” dalam pengertian, terjadi konflik internal, atau dengan kata lain, seorang individu tidak menerima atau menolak atribut-atribut ini sebagai milik⁴⁴. Dalam hal ini, antara individu dan atribut sosial yang dimilikinya saja bisa terjadi konflik, apalagi konflik dengan individu atau kelompok lain yang memiliki atribut identitas sosial yang berbeda.

Sebagai contoh penulis ingin menjelaskan dua identitas sosial, yaitu “etnis” dan “agama”.

Pertama, identitas etnis. Kata etnis berasal dari kata etnisitas yang hingga kini mendapat beberapa pengertian yang berbeda dari beberapa ahli. Namun dari sekian banyak pendapat

⁴² Ibid.,

⁴³ lihat Ralf R. Premdas, 1996, *Secessionist Movement in Comparative Perspective*. Dalam Abdollah Ramezanzadeh, op.cit., hlm. 9

⁴⁴ lihat Rodolfo Stavenhagen, 1990, *The Ethnic Question: Conflict, Development, and Human Rights*, United Nations University Press, hlm. 1

terdapat satu konsensus bersama yang menjelaskan bahwa etnisitas memiliki komponen subyektif dan obyektif. Komponen subyektif terdiri dari kesadaran identitas, rasa kepemilikan, solidaritas dan kepentingan bersama. Sedangkan komponen obyektif berupa bahasa, latar belakang sejarah, dan juga wilayah (berkaitan dengan asalnya saat ini). Menurut Rodolfo Stavenhagen (1990), etnis merupakan entitas yang dimiliki sekelompok orang yang belum tentu telah mencapai atau menunjukkan kesadaran berbangsa namun terlanjur disatukan oleh ras, bahasa, budaya, atau hubungan sebangsa yang membuat mereka berbeda dari kelompok lainnya dan sekaligus menjadi identitas dari setiap anggotanya⁴⁵.

Identitas etnis cenderung menimbulkan loyalitas dan menyatu dengan suatu kelompok tertentu dan oleh sebab itu menciptakan perasaan aman. Sementara solidaritas etnis kemudian muncul dalam bentuk hubungan "kami-mereka". Solidaritas etnis dimobilisasi dan dipolitisasi melalui keluhan-keluhan untuk melawan sistem politik yang lebih besar, atau kelompok etnis lain yang dominan. Identitas etnis dirasakan oleh setiap individu berpengaruh untuk memobilisasi atau mendorong aksi individu untuk membela kelompoknya. Dengan kata lain, dalam setiap aksi bersama yang berbentuk konflik pasti muncul kesadaran etnisitas dan identitas⁴⁶. Ramezanzadeh mengidentifikasi kelompok etnis berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut: (1) membagi wilayah bersama atas dasar kesamaan biologis dan latar belakang bahasa; (2) memiliki ikatan budaya; (3) berada dalam satu lingkungan unit politik yang lebih besar atau berdampingan dengan kelompok-kelompok lain; (4) identifikasi diri atau perasaan sebagai bagian dari kelompok dan adanya penghargaan dari orang lain sebagai bagian dari kelompok tersebut; dan (5) perkumpulan bersama sebagai kelompok dalam konteks organisasi khusus⁴⁷. Identitas etnis

⁴⁵ *ibid.*,

⁴⁶ Abdollah Ramezanzadeh, *op.cit.*, hlm. 12-13

⁴⁷ *ibid.*,

memainkan peranan penting dalam mobilisasi anggota etnis, yang pada akhirnya mengakibatkan konflik.

Kemudian pada tingkat yang lebih luas, di mana ketika sebuah sistem internasional memiliki ratusan negara berdaulat, di dalamnya terdapat ratusan bahkan jutaan etnis yang berperan membentuk sistem itu. Dan kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar negara di dunia merupakan *polyethnic nation (multi-ethnic state)* sekalipun hanya sedikit negara yang mengakui keberadaan multi-etnis ini. Kebanyakan dari negara-negara itu berusaha untuk menjadi *monoethnic* atau yang biasa disebut *uninational state*. Tujuannya jelas ingin menghindari konflik akibat beragamnya kepentingan antar-etnis di dalamnya.

Kedua identitas Agama. Agama (*Religion* atau *Religi*) dari bahasa Latin, *Religare* yang artinya “mengikat” (tempat di mana manusia mengikatkan diri pada Sang Khalik). Manusia mengikatkan diri pada Sang Khalik melalui sebuah perjanjian yang disebut “perjanjian primordial” (istilah Nurcholish Madjid). Perjanjian primordial ini tersimpan dan mengendap di bawah alam sadar manusia yang paling dalam, sehingga amat sulit untuk muncul pada tataran kesadaran terbuka atau alam pikiran yang rasional. Namun demikian ia sungguh nyata dan amat jelas mempengaruhi jalan hidup manusia melalui dorongan alami dan naluri untuk menyembah suatu obyek sesembahan yang sering disebut sebagai Tuhan⁴⁸. Persoalan muncul ketika manusia tidak berhasil “menemukan” sasaran penyembahan yang benar, sehingga menjerumuskan manusia itu kepada makna hidup yang salah atau menyesatkan. Wujud konkret dari kesesatan ini berupa praktik ketundukan dan pengabdian yang melahirkan sistem yang tiranik dan merampas harkat dan martabat manusia. Terlepas dari dua wujud penyembahan yang berbeda (benar dan salah) namun asal-muasalnya sama-sama merupakan dorongan yang paling dasar (asasi) untuk berbakti dan menyembah Sang Khalik. Dengan demikian bisa dipahami bahwa kedahsyatan efek

⁴⁸ lihat, Nurcholish Madjid, *Persoalan Makna Hidup Bagi Manusia modern*, (Makalah Seminar), Fakultas Filsafat Unpar, Desember 1994

negatif penyembahan ini, akibat tidak berhasil menemukan sasaran penyembahan yang benar sangat sulit dikendalikan pikiran rasional. Sejarah perjalanan agama membuktikan bahwa kemungkinan untuk terjadinya sasaran penyembahan yang salah selalu terbuka. Tambahan pula dalam agama sendiri terdapat dimensi sosiologis penyembahan (hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan masyarakat sosial) di mana manusia selalu punya kemungkinan untuk menilai agama lain menurut kacamata nya sendiri. Akibatnya konflik dengan penganut agama lain sulit dihindari.

Konsekuensi lebih lanjut dari dua wujud dasar agama di atas, saat ini kita kenal agama sebagai “identitas”, di mana di dalamnya berorientasi materi (kelembagaan) dan kekuasaan dengan satu tujuan, yaitu “status quo”. Wujud agama seperti ini seringkali menjadi sumber kekacauan, konflik, dan perebutan kekuasaan karena mengklaim yang paling benar, bahkan dalam satu agama pun terdapat aliran-aliran pemikiran yang berbeda dan tak jarang terjadi konflik mengenai interpretasi siapa yang paling “akurat”. Dalam kondisi seperti ini agama selalu terbuka untuk dimobilisasi para investor politik, yang akhirnya menimbulkan kekacauan dan konflik, baik di dalam satu agama maupun dengan agama lain. Wujud yang lain adalah agama sebagai “spiritualitas”, di mana di dalamnya berorientasi roh/ruh, kasih, perdamaian, kebajikan dan non-ego (*selflessness*) yang bersumber pada batin dengan tujuan “perubahan”⁴⁹. Wujud agama seperti ini bisa diandalkan sebagai landasan keadilan sosial karena lebih melihat persatuan diantara manusia ketimbang perbedaan-perbedaan eksternal yang diperoleh dari identitas seperti seksual, etnis, religius, status sosial, ekonomi, politik, dll. Sekalipun demikian semua pihak tentu prihatin melihat kemunduran dan kemerosotan wujud agama sebagai spiritualitas saat ini. Asumsi yang mengatakan adanya kebangkitan agama, khusus dilihat dari aspek spiritualitas nampaknya keliru. Saat ini agama sebagai spiritualitas tengah mengalami

⁴⁹ lihat, Julia J. Suryakusuma, *Religi Sebagai Identitas dan Spiritualitas*, (Makalah Seminar), Kerja sama Unpar dan Fakultas Filsafat unpar, Mei, 1995.

degradasi yang paling parah akibat dominasi dan mengemukanya wujud agama sebagai identitas, di mana kita saksikan bahwa atas nama agama manusia dengan penuh semangat dan antusias menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan, membunuh dan membantai orang lain hanya karena berbeda keyakinan. Keadilan, perdamaian, kasih, persaudaraan yang diharapkan malah yang nampak kebencian, permusuhan, pertikaian, dsb.

Menanggapi kondisi seperti ini, agama nampaknya memang ambigu; di satu pihak sebagai kesadaran paling asasi dan mendasar mempengaruhi jalan hidup manusia dalam hubungannya dengan yang adikodrati namun di lain pihak, berdasarkan kesadaran asasi yang sama agama juga menghancurkan hidup manusia sendiri dan lingkungannya (dalam kaitan dengan manusia yang beragama lain). Inilah ironi dalam agama yang seringkali dipakai untuk memobilisasi massa guna menghancurkan massa dari agama lain.

Dengan demikian nampak bahwa tidak mudah untuk memahami konflik internal negara. Ada banyak sekali persoalan yang melatarbelakangi terjadinya konflik, dan persoalan-persoalan itu pun terkait satu dengan yang lain. Sehubungan dengan konflik sosial yang terjadi di Indonesia pasca orde baru, penulis mencoba memetakan beberapa persoalan yang melatarbelakanginya. *Pertama*, fakta hilang atau berkurangnya dominasi politik militer terhadap sipil melalui pencabutan doktrin dwifungsi ABRI. *Kedua*, tumbanganya rejim orde baru yang diikuti kekacauan politik nasional. *Ketiga*, kesenjangan pembangunan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa, dan antara pendatang dan penduduk asli, terutama dalam memperebutkan sumberdaya ekonomi. *Keempat*, tatanan dunia global (eksternal) yang mendorong setiap individu atau kelompok untuk berjuang atas dasar kepentingan sendiri, sementara sistem dalam masyarakat melalui negara belum siap untuk mengatur mekanisme pencapaian semua kepentingan itu. *Kelima*, penyeragaman sistem birokrasi modern dari pusat sampai ke pelosok, yang berakibat pada hilangnya kekuasaan sultan, tuan tanah atau kepala suku (birokrasi tradisional). Kekuasaan

birokrat tradisional dilucuti dan diganti oleh birokrat modern, mulai dari kepala desa sampai gubernur. *Keenam*, klaim kebenaran atas agama dan dominasi budaya (etnis, suku, adat-istiadat, bahasa) yang berakibat langsung pada munculnya konflik antar agama dan dan budaya. *Ketujuh*, kombinasi dari berbagai persoalan di atas yang mampu mengkonstruksi kondisi tertentu dan pada akhirnya pecah konflik⁵⁰. Ketujuh persoalan ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab berikutnya. Poin yang paling penting bagi penulis adalah korelasi antara tujuh persoalan ini dengan konflik yang terjadi di daerah penelitian.

METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

A. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis kualitatif dan menyampaikan data hasil penelitian secara eksploratif-deskriptif. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena tidak ingin terjebak pada data (angka) yang statis dan kaku, tetapi lebih cair dan fleksibel. Apalagi subyek penelitian terkait langsung dengan interaksi dan perilaku (kekerasan) antar manusia dalam masyarakat, baik individu maupun kelompok. Selain itu penulis juga ingin mendapatkan data yang lebih komprehensif dan mendalam, termasuk analisis seksama terhadap data yang diperoleh guna mendapatkan makna yang sesungguhnya dari data dan informasi tersebut. Analisis ini tentu tidak bermaksud membelokan data sesuai kebutuhan peneliti, tetapi semata-mata mendasarkan diri pada data yang terkumpul. Melalui studi kasus diharapkan bisa mendapat pemahaman baru terhadap konflik, bukan hanya semata-mata mengidentikkan konflik dengan kerusakan dan malapetaka kemanusiaan.

⁵⁰ Farsijana Adeney-Risakotta, *Mobilizing Conflict through Media*, Studi Kasus Konflik Maluku Utara, op.cit.,

B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, ada kurang lebih tiga pendekatan yang digunakan, yaitu: 1). Focus Group Discussion (FGD). Dalam diskusi ini akan dikumpulkan beberapa tokoh masyarakat dari kedua belah pihak, maksimal 5 orang dari satu kelompok sehingga jumlahnya 10 orang. Tema diskusi akan dipilih sesuai kebutuhan mereka saat itu, tetapi yang jelas tidak berkaitan dengan konflik yang telah terjadi. Hal itu dilakukan karena saya tidak ingin mereka mengingat kembali pengalaman pahit yang telah terjadi, tetapi saya secara khusus ingin melihat bagaimana mereka membangun hidup dan relasi sosialnya yang baru dengan tetap belajar pada pengalaman masa lalu (konflik). Melalui diskusi ini saya akan melihat respon mereka masing-masing, apakah masih ada gap di antara mereka atau sebaliknya justru sangat toleran terhadap pendapat yang berbeda, terutama pendapat dari lawan kelompoknya. 2). Wawancara (*interview*) terbatas terhadap beberapa tokoh masyarakat atau masyarakat biasa (informan) dari masing-masing kelompok yang telah bertikai. Poin penting yang ingin didapat dari wawancara ini adalah pandangan tokoh-tokoh tersebut terhadap konflik yang telah terjadi dan bagaimana menurut penglihatan mereka proses afirmasi dan transformasi sosial yang terjadi pasca konflik. Selain itu saya juga ingin mengetahui, apakah mereka sebagai tokoh masyarakat memiliki konsep yang bisa dipakai untuk membangun kembali tatanan masyarakat yang telah rusak akibat konflik, tetapi dalam pelaksanaan konsep itu mengalami kendala. 3). Partisipasi langsung pada aktivitas sehari-hari. Untuk melaksanakan pendekatan ini selayaknya disediakan waktu yang cukup, tetapi kenyataannya penulis hanya punya waktu satu bulan untuk melaksanakan semua ini. Namun penulis akan tetap memaksimalkan waktu yang ada dan berharap mendapatkan pemahaman yang sungguh-sungguh terhadap persoalan yang akan diteliti. Dalam pelaksanaan pertama-tama penulis akan melakukan pendekatan kepada satu atau dua keluarga dari masing-masing kelompok dan berusaha untuk masuk dalam aktivitas mereka sehari-hari. Melalui pendekatan ini

penulis ingin melihat bagaimana mereka menjalani hidupnya sehari-hari setelah sebelumnya porak-poranda akibat konflik. Selain itu penulis juga ingin mengetahui bagaimana pandangan mereka terhadap lawan kelompoknya setelah konflik berakhir.

Semua data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif guna mendapatkan pemahaman (makna) dari setiap informasi dan aktivitas yang terjadi pasca konflik. Melalui data dan informasi tersebut diharapkan bisa mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan maksud penelitian ini, yaitu melihat konflik sebagai instrumen afirmasi perbedaan kepentingan identitas. Apakah konflik sungguh-sungguh menjadi bagian dari solusi terhadap persoalan perbedaan kepentingan, terutama berkaitan dengan perbedaan identitas etni.

SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menata jalan pikiran yang akan dibahas dalam tulisan ini penulis menggunakan sistematika yang lazim dipakai, yaitu BAB I PENDAHULUAN, yang berisi **Latar Belakang** permasalahan dan tema yang dipilih. Di dalamnya disampaikan alasan pemilihan tema dan mengapa tema ini dipandang menarik dan pantas untuk dikaji lebih jauh. **Identifikasi Masalah**, memuat pokok-pokok persoalan yang menjadi perhatian utama dalam tulisan ini. **Perumusan Masalah**, menata kembali pokok-pokok persoalan yang menjadi perhatian utama dan mencoba menyusunnya menjadi satu-kesatuan yang utuh. **Pembatasan Masalah**, memuat semacam “rambu-rambu” yang akan ditelusuri dalam pembahasan dan berusaha untuk konsisten pada jalur itu. Sehingga nampak spesifikasi ruang lingkup pembahasan dan diharapkan tidak melebar ke persoalan lain. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**, berisi manfaat bisa didapatkan dari hasil penelitian ini, baik untuk penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya. **Kerangka Pemikiran**, memuat landasan teoretis melalui pemikiran para tokoh dan tekstur pembahasan, di mana penulis berusaha menyusun tahapan pembahasan dari yang sangat global sampai yang

spesifik berkaitan dengan tema dan kasus penelitian. **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**, memuat metode analisis data dan teknik-teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data. **Sistematika Penulisan**, berisi tekstur penulisan, mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan. BAB II MENGENAL DAERAH DAN MASYARAKAT SAMBAS DI KALIMANTAN BARAT. Bab ini berisi data-data berkaitan dengan kondisi geografis, iklim, keadaan tanah, masyarakat, dll. Data-data ini diharapkan bisa membantu pembaca untuk mendapatkan gambaran awal mengenai Kabupaten Sambas. Selain itu data-data ini juga sangat penting untuk memahami konstruksi persoalan yang menyebabkan terjadinya konflik Sambas tahun 1999.

BAB III KONSTRUKSI PERSOALAN KONFLIK: DARI MASALAH DEMOGRAFIS SAMPAI PRILAKU KEKERASAN. Dalam bagian ini, penulis membahas bagaimana bangunan persoalan konflik, mulai dari perubahan di tingkat global, yaitu perang antar negara kemudian bergeser ke konflik internal negara. Pergeseran ruang lingkup ini ternyata mempengaruhi konsentrasi kajian konflik dalam studi hubungan internasional. Intensifnya interaksi dan ketergantungan negara-negara dalam era globalisasi ternyata berimplikasi pada munculnya tuntutan berbagai kelompok masyarakat untuk menunjukkan kepentingan identitas yang berbeda. Untuk menanggapi perkembangan di tataran global pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan itu pada akhirnya memunculkan berbagai persoalan, mulai dari kependudukan sampai perilaku kekerasan. BAB IV. KONFLIK DAN TRANSFORMASI SOSIAL PASCA-KONFLIK. Dalam bagian ini, penulis membahas kronologis, periode, dan anatomi konflik Sambas sebagai langkah awal memasuki pembahasan mengenai proses afirmasi dan transformasi sosial dalam masyarakat pasca konflik. Konflik dipahami sebagai salah satu pendekatan yang pada akhirnya menghasilkan proses afirmasi dan transformasi sosial.

BAB V AFIRMASI DAN REKAYASA SOSIAL PASCA KONFLIK. Bab ini membahas kondisi sosial masyarakat pasca konflik, dalam pengertian, mencermati relasi yang terbangun pasca konflik. Secara tidak langsung bab ini ingin menguji asumsi yang telah terbangun pada bab-bab sebelumnya, di mana konflik dipahami sebagai instrumen afirmasi dan transformasi kepentingan identitas yang berbeda. Selain itu, penulis juga ingin melihat rekayasa sosial, dalam pengertian, konstruksi kesepakatan lintas kepentingan yang muncul pasca konflik.

BAB VI PENUTUP/ KESIMPULAN. Memuat pendapat pribadi penulis sebagai intisari dari seluruh pembahasan di atas, terutama berkaitan dengan tujuan pokok tulisan ini. Dengan kata lain, penulis ingin menegaskan kembali poin-poin yang dianggap penting dari tulisan ini.

